



KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA BAGI PEKERJA DI SEKTOR EKONOMI INFORMAL

Melindungi dan menjamin sistem perlindungan sosial dan pengasuhan untuk semua anak dan keluarga dalam situasi COVID-19 dan ke depannya

UCAPAN TERIMA KASIH:

Publikasi ini disusun bersama oleh Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), United Nations Children's Fund (UNICEF) dan International Labour Organization (ILO). Ringkasan kebijakan didasarkan pada seruan aksi UNICEF kepada pemerintah dan bisnis untuk mendesain ulang tempat kerja di masa depan dan agar orang tua dan pengasuh memberikan yang terbaik bagi perkembangan hidup anak-anaknya, sembari meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Temukan lebih lanjut di "Mendesain ulang tempat kerja agar ramah keluarga: Hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah dan bisnis." Selain itu, sumber daya ini didasarkan pada seruan ILO untuk mempromosikan investasi dalam ekonomi perawatan sebagai bagian dari agenda transformatif untuk kesetaraan gender dari "Deklarasi Seratus Tahun ILO untuk Kerja Masa Depan". Buku ini juga merupakan perluasan dari seri *policy brief* ILO dan WIEGO: "Pengasuhan anak untuk pekerja di ekonomi informal," yang mengeksplorasi bagaimana layanan pengasuhan anak yang universal, didanai oleh publik dan berkualitas, dengan pekerjaan pengasuhan yang layak dan sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial, dapat meningkatkan kehidupan dan keamanan ekonomi pekerja perempuan di sektor ekonomi informal, mendukung transisi mereka ke ekonomi formal dan mendorong kesetaraan gender di tempat kerja.

Policy brief ini disusun dan ditulis oleh Rachel Moussié dari WIEGO, Ruth Graham Goulder, Shreyasi Jha, Christopher Kip, Grainne Moloney, Leigh Pasqual, Chemba Raghavan, Sarah Rossmann, Erica Wong dari UNICEF, Laura Addati, Christina Behrendt, Umberto Cattaneo, Ian Orton dan Emanuela Pozzan dari ILO.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengulas berikut atas wawasan dan kontribusi teknis mereka:

Laura Alfery, Victor Aguayo, Carolina Aulicino, Serghei Buruiana, Alexandre Cote, Pamela Dale, Enrique Delamónica, Erinna Dia, Nada Elattar, Maya Elliott, Solrun Engilbertsdottir, Nathalie Hamoudi, Francie Lund, Ana Nieto, Katherine Ortiz, Lauren Pandolfelli, Natalia Winder-Rossi, Monica Rubio, Lauren Rumble, Fatmata Fatima Sesay, David Stewart, Maribel E Ullman dan Jennifer Waidler.

Editor: ProseWorks

Desain dan Tata Letak: Big Yellow Taxi, Inc.

Kredit Foto Sampul: © Paula Bronstein/Getty Images/Images of Empowerment

Viboonsri Wongsangiyim dan suaminya, Bang Aree, mencari nafkah dengan memproduksi pakaian Muslim di rumah di komunitas Lam Hin Tai, pinggiran kota Bangkok. Cucu mereka, Aunpat Prasertkarn, berusia 2 tahun, ikut membantu orang tuanya. Seperti kebanyakan pekerja berbasis rumahan, pasangan ini mengalami kesulitan karena pekerjaan yang tidak menentu dan pendapatan yang naik turun. Namun, bekerja di rumah memberikan mereka fleksibilitas agar dapat menghabiskan waktu bersama keluarga sebanyak yang mereka butuhkan.

Juli 2021

KOTAK 1: Definisi utama

Pekerjaan perawatan: Kegiatan perawatan terdiri dari dua kategori besar. Yang pertama mencakup pekerjaan yang dilakukan langsung, tatap muka, kegiatan perawatan pribadi (kadang-kadang disebut sebagai "pengasuhan" atau "perawatan relasional"), seperti memberi makan bayi, merawat pasangan yang sakit, membantu orang tua untuk mandi, menemani untuk menjalani pemeriksaan kesehatan atau mengajar anak kecil. Kategori kedua mencakup kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan perawatan tidak langsung, yang tidak memerlukan perawatan pribadi tatap muka, seperti membersihkan, memasak, mencuci pakaian dan tugas-tugas pemeliharaan rumah tangga lainnya (kadang-kadang disebut sebagai "perawatan non-relasional" atau "pekerjaan rumah tangga"), yang menopang pengasuhan pribadi. Kedua kategori ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan dalam praktiknya seringkali tumpang tindih, baik dalam rumah tangga maupun dalam sebuah institusi.¹

Perkembangan Anak Usia Dini: Periode usia anak usia dini meliputi usia 0 sampai 8 tahun. Meskipun definisi tersebut juga mencakup usia 6 hingga 8 tahun, fokus dari ringkasan kebijakan ini adalah pada tahun-tahun awal kehidupan anak hingga masuk sekolah. Perkembangan adalah suatu hasil – merupakan proses berkelanjutan untuk memperoleh keterampilan dan kemampuan selama periode usia ini – di seluruh domain kognisi, bahasa, motorik, perkembangan sosial dan emosional – yang membantu kita untuk berpikir, memecahkan masalah, berkomunikasi, mengekspresikan emosi dan menjalin hubungan. Perkembangan merupakan hasil interaksi antara lingkungan dan anak. Lingkungan yang stabil adalah lingkungan yang peka terhadap kebutuhan kesehatan dan gizi anak, dengan memberikan perlindungan dari ancaman, kesempatan untuk belajar sejak dini, dan interaksi-interaksi yang responsif, memberikan dukungan emosional, dan merangsang perkembangan anak.²

Kebijakan ramah keluarga: Kebijakan ramah keluarga adalah langkah-langkah dan pengaturan yang berdampak positif pada kemampuan pekerja untuk menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan keluarga – dan mendorong perkembangan dan kesejahteraan anak-anak dan pengasuh.

Keuntungan potensial dari kebijakan ramah keluarga di antaranya mengurangi kematian anak dan berat badan lahir rendah, mengurangi kasus pelecehan anak, meningkatkan tingkat pemberian ASI dan imunisasi, meningkatkan perkembangan kognitif anak dan prestasi di sekolah, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan bagi pengasuh utama.³

Perlindungan sosial: adalah hak asasi manusia dan secara luas dipahami sebagai "seperangkat kebijakan dan program yang ditujukan untuk mencegah atau melindungi semua orang dari kemiskinan, kerentanan dan pengucilan sosial sepanjang hidup mereka, dengan penekanan khusus pada kelompok rentan".⁴ Hal ini sangat terkait dengan perlindungan terhadap orang-orang ketika menghadapi perubahan jalan hidup tertentu atau guncangan pada individu/rumah tangga, seperti kehamilan, kehilangan pekerjaan, atau usia tua, serta peristiwa yang mempengaruhi komunitas dan/atau masyarakat dalam skala besar, seperti banjir atau COVID-19. Perlindungan sosial cenderung mengacu pada empat aspek utama sistem:

- bantuan sosial (baik bantuan langsung tunai maupun dukungan dalam bentuk barang, bantuan umum maupun yang tersasar);
- jaminan sosial (seperti jaminan kesehatan);
- kebijakan dan program pasar tenaga kerja (seperti cuti melahirkan untuk orang tua atau skema jaminan kerja); dan
- penyediaan bantuan sosial nontunai.⁵

Ekonomi informal: Hal ini merujuk pada semua kegiatan ekonomi oleh pekerja dan unit ekonomi yang – dalam undang-undang atau dalam praktik – tidak tercakup atau tidak cukup tercakup oleh pengaturan formal; sektor ini mencakup usaha informal (sektor informal) serta pekerjaan informal, baik di sektor informal maupun formal. Pekerja di perekonomian informal sangat beragam dari segi tingkat pendapatan, usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, sektor, jenis dan ukuran usaha lokasi tempat kerja (pedesaan atau perkotaan, area privat atau publik).⁶



LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak buruk yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kemampuan orang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pekerjaan dan perawatan untuk anak-anak dan keluarga mereka. Dengan perlambatan kegiatan ekonomi dan risiko kesehatan yang ekstrem, jutaan orang terus menghadapi gangguan pendidikan dan pengasuhan anak, penyakit keluarga, kehilangan pekerjaan, dan berkurangnya pendapatan yang dikhawatirkan akan berlangsung lama. Hal ini terutama dialami 2 miliar pekerja di sektor ekonomi informal, yang mewakili 61 persen dari angkatan kerja secara global.⁷ Kurangnya akses ke banyak atau bahkan semua aspek sistem jaminan sosial dan peraturan ketenagakerjaan yang kuat telah menyebabkan hilangnya pendapatan secara dramatis, peningkatan risiko kerawanan pangan dan kelaparan,⁸ dan meningkatnya kerentanan terhadap guncangan di masa depan. Hal ini termasuk kurangnya akses ke cakupan kesehatan semesta, tunjangan anak, cuti sakit dan cuti perawatan yang dibayar, cuti hamil, cuti melahirkan dan cuti orang tua, tunjangan pengangguran, pensiun, tunjangan tunai lainnya, serta perlindungan sosial dan mekanisme regulasi tenaga kerja secara lebih luas. Meskipun begitu, kebijakan ramah keluarga dan perlindungan sosial merupakan hak dasar bagi semua pekerja, anak-anak mereka dan keluarga mereka, tanpa memandang status pekerjaan, lokasi geografis, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, usia atau karakteristik lainnya.⁹

"Kebijakan ramah keluarga" adalah istilah yang digunakan untuk mengomunikasikan paket kebijakan berbasis bukti khusus yang mendukung perkembangan anak, pengurangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan peningkatan hasil kesehatan dan pendidikan. Kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga setiap anggota keluarga, dengan pengakuan penuh bahwa setiap manusia berhak – menggarisbawahi gagasan bahwa hak-hak anak tidak dapat dilindungi dan diperluas jika pengasuh mereka tidak mendapatkan hak-hak tersebut pula. Atas dasar ini, UNICEF, ILO dan UN Women menyerukan penerapan paket empat kebijakan penting sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan sosial yang lebih luas, termasuk panduan terbaru untuk dunia usaha selama COVID-19,¹⁰ yang secara khusus berfokus pada:

- ketentuan kebijakan cuti orang tua berbayar dan cuti perawatan lainnya;
- dukungan menyusui;
- akses ke pengasuhan anak yang terjangkau dan berkualitas baik; dan
- tunjangan anak universal dan upah yang memadai.

Bukti telah menunjukkan nilai dari kebijakan ini dalam mencapai triple bottom line dari keuntungan finansial, pemberdayaan perempuan dan pengembangan holistik anak-anak.¹¹

Penerapan kebijakan ini sangat penting untuk kemajuan dalam upaya mencapai beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk peningkatan standar hidup generasi saat ini dan generasi mendatang.¹² Namun, meskipun penting untuk tahun-tahun awal perkembangan anak, kami menyadari bahwa kita memerlukan lebih dari empat elemen ini yang lebih luas untuk mengembangkan dan berinvestasi dalam sistem perlindungan dan pengasuhan sosial yang kuat yang merespons, melindungi, dan memberdayakan semua orang sepanjang hidup mereka.

Misalnya, informasi spesifik, layanan, penyediaan perawatan dan perlindungan sosial yang lebih luas dan kebijakan pasar tenaga kerja sangat penting untuk mendukung perubahan transformatif untuk perkembangan dan kesejahteraan anak, kesetaraan gender dan untuk merespons berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. Upah yang memadai dan kebijakan pasar tenaga kerja untuk semua orang, termasuk pekerja perawatan yang dibayar juga merupakan bagian penting dari agenda ini, sayangnya hal ini sering dikesampingkan meskipun faktanya banyak pekerja perawatan berada di sektor ekonomi informal, hidup dalam kemiskinan dan memiliki anak dan mereka sendiri masih menanggung beban pekerjaan perawatan tanpa bayaran untuk keluarganya masing-masing.

Tujuan dari kertas kebijakan ini adalah untuk menganalisis kebutuhan khusus para pekerja di sektor ekonomi informal serta kebutuhan anak-anak mereka dan menyoroti kesenjangan mendesak dan berbagai kebijakan ramah keluarga yang diperlukan untuk mendukung kelompok ini, terutama dalam hal pengasuhan anak kecil. Kita perlu memahami kondisi kerja tertentu, kerentanan, dan peluang kerja bagi pekerja di ekonomi informal – dampaknya terhadap perkembangan anak dan dimensi gender mereka – untuk menjadi basis informasi dalam merancang dan menerapkan berbagai kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan ramah keluarga. Meskipun didasari oleh urgensi karena krisis COVID-19 saat ini, terdapat pula peluang untuk berinvestasi dan menerapkan respons dan langkah-langkah kebijakan khusus agar terciptanya manfaat jangka panjang yang lebih berkelanjutan dan jalur pemulihan pasca-krisis yang lebih adil untuk semua orang.

Kertas kebijakan ini menandai perkembangan dalam advokasi bersama kami dalam mempromosikan investasi dalam ekonomi perawatan dan perlindungan sosial, termasuk kebijakan ramah

keluarga. Hal ini meliputi peningkatan fokus pada kesejahteraan dan kondisi kerja pengasuh di sektor ekonomi informal dan perkembangan anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. ILO memperkirakan bahwa para pekerja di sektor ekonomi informal termasuk kelompok yang mengalami dampak pandemi COVID-19 paling parah, namun seringkali mendapat jaminan sosial yang lemah atau bahkan tidak memiliki jaminan sosial dan perawatan sosial yang ramah keluarga.¹³ Hal ini menunjukkan adanya masalah kesenjangan

yang kritis yang, jika tidak diatasi, akan membuat tujuan kita untuk mengatasi kemiskinan anak, kelaparan dan ketidaksetaraan gender – dan memenuhi SDGs – tidak mungkin tercapai. Kertas kebijakan ini juga menyoroti kebutuhan mengedepankan kebijakan dan respons perlindungan yang berkelanjutan daripada tindakan cepat dan jangka pendek demi mencapai solusi yang lebih transformatif dan adil gender yang mengarah pada hasil yang lebih baik bagi pekerja yang terpinggirkan dan hasil perkembangan yang lebih baik untuk anak-anak setelah pandemi.

ANALISIS SITUASI PEKERJA DI SEKTOR EKONOMI INFORMAL

Pekerjaan di sektor informal mewakili 90 persen dari seluruh pekerjaan di negara-negara berpenghasilan rendah, 67 persen di negara-negara berpenghasilan menengah dan 18 persen di negara-negara berpenghasilan tinggi.¹⁴ Pekerja di sektor ekonomi informal hadir di berbagai jenis pekerjaan termasuk, namun tidak terbatas pada, pertanian, jasa perawatan, konstruksi, manufaktur, ritel dan perdagangan, pengelolaan limbah, dan ekonomi pertunjukan. Mereka dicirikan oleh pendapatan yang rendah dan tidak menentu, jam kerja yang tidak rutin dan kurangnya perlindungan tenaga kerja dan sosial. Meskipun secara keseluruhan lebih banyak laki-laki daripada perempuan yang bekerja sektor ekonomi informal, perempuan lebih cenderung memiliki pekerjaan informal daripada laki-laki di Afrika, Asia dan Amerika Latin.¹⁵ Misalnya, pada tahun 2016, proporsi global perempuan yang memiliki pekerjaan informal dari total pekerja perempuan di seluruh dunia sebesar 58 persen, dibandingkan dengan laki-laki sebesar 63 persen, namun pekerjaan informal lebih umum dimiliki oleh perempuan di 66 dari 119 negara (56 per sen) berdasarkan data yang tersedia.¹⁶ Ada juga dimensi perjalanan hidup yang penting, di mana pekerjaan informal lebih umum dimiliki kaum muda (15-24) dan orang tua (65+).¹⁷

KOTAK 2: Sebagian besar pekerja di sektor ekonomi informal adalah pekerja mandiri (*self-employed*)

- Pengusaha (2,7 persen).¹⁸
- Pekerja usaha sendiri (45 persen).
- Pekerja yang membantu usaha keluarga (16,1 persen).
- Karyawan (36,2 persen).

Pekerja informal dapat berupa karyawan atau pekerja mandiri. Status pekerjaan mereka membuat mereka berhadapan dengan risiko tertentu dan memiliki cara yang berbeda untuk mendapatkan perlindungan melalui sistem jaminan sosial.¹⁹ Di antara para pekerja mandiri, terdapat beberapa kategori pekerja – pengusaha, pekerja usaha sendiri, anggota koperasi produsen dan pekerja yang membantu usaha keluarga. Yang terakhir adalah salah satu yang paling tidak berdaya karena mereka berpartisipasi dalam usaha yang dioperasikan oleh anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama dan seringkali tidak menerima pendapatan tunai, yang berimplikasi pada kekuatannya dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja usaha sendiri atau pekerja yang membantu usaha keluarga. Pada tahun 2018, perempuan lebih dari dua kali lebih mungkin menjadi pekerja yang membantu usaha keluarga dibandingkan dengan laki-laki.²⁰ Pekerja mandiri menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya perluasan perlindungan sosial yang mana mungkin memerlukan langkah-langkah khusus untuk mengakomodasi situasi mereka. Pekerja mandiri tidak hanya tidak memiliki majikan agar dapat ikut serta dalam skema jaminan sosial, tetapi penghasilan mereka seringkali terlalu rendah dan tidak menentu, sehingga menimbulkan tantangan terkait iuran mereka untuk bergabung dalam skema tersebut.²¹ Pada saat yang sama, cakupan perlindungan sosial sangat penting bagi pekerja mandiri.²² Ekonomi yang semakin merosot meningkatkan urgensi untuk mengikutsertakan mereka dalam skema jaminan sosial.

Pekerja dalam pekerjaan yang menerima upah atau gaji lebih mungkin untuk diikutsertakan dalam skema jaminan sosial; iuran wajib biasanya dibagi antara pekerja dan pemberi kerja. Namun, banyak pekerja informal yang menerima upah yang tidak mendapat manfaat jaminan sosial yang memadai dalam skema ini

jika pemberi kerja tidak mendaftarkan mereka atau jika pemberi kerja beroperasi dalam sektor ekonomi informal. Misalnya, meskipun pekerja rumah tangga berada dalam jenis pekerjaan yang mendapatkan upah, ILO memperkirakan bahwa hanya 6 persen dari pekerja rumah tangga yang mendapat manfaat jaminan sosial penuh, sementara sebagian besar hanya mendapat perlindungan seadanya, atau bahkan tidak memiliki jaminan sosial sama sekali.²³ Namun, beberapa negara telah mengambil langkah-langkah untuk memperluas undang-undang ketenagakerjaan dan jaminan sosial untuk menjangkau pekerja rumah tangga dan memfasilitasi akses mereka ke jaminan sosial.²⁴

KONDISI KERJA

Dalam sektor ekonomi informal, kondisi kerja seperti jam kerja yang panjang dan penghasilan yang rendah menjadi ciri dari model pekerjaan yang banyak diisi oleh perempuan. Penghasilan rendah berarti bahwa banyak pekerja di sektor ekonomi informal kesulitan untuk membayar tingginya biaya layanan pengasuhan anak swasta berkualitas baik. Memvariasikan jam kerja dan lingkungan tempat kerja juga dapat mempengaruhi bagaimana pekerja mampu mengelola pekerjaan dan tanggung jawab perawatan rumah tangga mereka. Misalnya, pemulung di Brasil yang mengumpulkan barang-barang daur ulang dari kantor bekerja antara saat pagi-pagi sekali atau sore hari setelah kantor tutup. Oleh karena itu, mereka memerlukan layanan dukungan pengasuhan anak selama jam-jam tersebut untuk memastikan bahwa anak-anak mereka berada di lingkungan yang aman saat mereka bekerja di lingkungan yang serba tidak pasti dan berbahaya.²⁵

Diskriminasi gender implisit dan eksplisit

Dalam sektor ekonomi informal, perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah dengan risiko kemiskinan yang lebih tinggi daripada laki-laki.^{26,27} Meskipun tidak semua pekerja informal mengalami kemiskinan, sebagian besar menghadapi risiko kemiskinan dan kerawanan pangan yang lebih tinggi. Perbedaan jenis kelamin dalam kemiskinan paling mencolok dalam hal pengasuhan dan tanggung jawab rumah tangga yang biasanya dibebankan paling berat kepada perempuan, di mana perempuan dalam kelompok usia 24-34 tahun 25 persen lebih mungkin masuk dalam jurang kemiskinan.²⁸ Di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah, peluang pekerjaan formal bagi perempuan dan laki-laki tidak banyak. Oleh karena itu, transisi ke pekerjaan formal sulit dilakukan. Selain itu, perempuan menghadapi hambatan sosial, hukum, dan ekonomi lainnya dalam mengakses pekerjaan formal. Perempuan mungkin memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan dan pelatihan dan menghadapi norma gender dan hukum yang diskriminatif yang tidak mengizinkan perempuan untuk bekerja atau memperkuat peran mereka sebagai pencari nafkah sekunder. Selama pandemi COVID-19, pekerja perempuan di sektor ekonomi informal menghadapi guncangan ekonomi yang lebih besar karena mereka terkonsentrasi di sektor yang paling terdampak oleh pemutusan hubungan kerja dan pendapatan yang lebih rendah.

Pekerjaan perawatan yang tidak dibayar

Secara global, ada ketidakseimbangan yang mencolok dalam distribusi pekerjaan perawatan yang tidak dibayar berbasis gender. Hal ini mengacu pada waktu, energi, dan sumber daya yang digunakan untuk memasak, membersihkan, dan merawat anak-anak, orang sakit, dan orang tua, baik di dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Sebelum pandemi COVID-19, perkiraan global terbaru dari survei penggunaan waktu nasional menunjukkan bahwa rata-rata, perempuan melakukan pekerjaan perawatan tidak dibayar tiga kali lebih banyak daripada laki-laki per hari – 265 menit untuk perempuan dan 83 menit untuk laki-laki.²⁹ Selain itu, waktu yang dihabiskan perempuan untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar meningkat secara substansial jika memiliki anak di bawah lima tahun di rumah tangga. Di Ghana, misalnya, ketika ada anak kecil di rumah, perempuan menghabiskan tambahan 107 menit untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar per hari, sementara laki-laki hanya menghabiskan tiga menit tambahan.³⁰

Tanggung jawab perempuan yang tidak proporsional untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar juga memaksa mereka untuk memilih pekerjaan informal yang lebih fleksibel dan dibayar rendah untuk menyalurkan tanggung jawab keluarga dengan kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini berkontribusi pada konsentrasi perempuan dalam bentuk pekerjaan berpenghasilan terendah dan paling rentan dan tidak menentu dalam sektor ekonomi formal dan informal.³¹ ILO memperkirakan bahwa, pada tahun 2018, 606 juta perempuan usia kerja menganggap diri mereka tidak dapat bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena memiliki beban pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, dibandingkan dengan hanya 41 juta laki-laki.³² Sebagian besar tenaga kerja potensial ini dapat diberdayakan melalui akses universal terhadap kebijakan, layanan, dan infrastruktur perlindungan dan perawatan sosial.

Data dari 31 negara berpenghasilan rendah dan menengah menunjukkan bahwa pengasuhan anak sebagian besar disediakan oleh pengasuh yang tidak dibayar tanpa adanya ketersediaan layanan pengasuhan anak yang terjangkau. Pengasuh tidak dibayar untuk anak-anak di bawah usia enam tahun paling umum adalah perempuan yang bekerja, akibatnya mereka menjalani "shift ganda" untuk melakukan pekerjaan berbayar dan tidak dibayar.³³ Pekerja perempuan mungkin menghadapi keputusan sulit untuk membawa anak-anak mereka ke tempat kerja atau meninggalkan mereka di rumah tanpa pengawasan dengan risiko yang meningkat. Menurut analisis Bank Dunia, lebih dari 40 persen dari semua anak di bawah usia sekolah dasar – hampir 350 juta – tidak memiliki akses ke layanan pengasuhan anak.³⁴ Selain itu, diperkirakan 250 juta anak di bawah 5 tahun berisiko tidak mencapai potensinya.³⁵ Semua ini menekankan adanya kebutuhan mendesak akan kebijakan ramah keluarga yang transformatif gender agar menjadi fokus tajam. Kebijakan ini adalah cara utama untuk mengurangi ketidakseimbangan gender dalam rumah tangga, dan untuk mendorong pengasuhan bersama dan tanggung jawab bersama yang lebih besar antara pengasuh perempuan dan laki-laki demi kesejahteraan keluarga mereka.³⁶

Analisis tanggung jawab perawatan harus mempertimbangkan pengaturan keluarga yang beragam. Misalnya, dalam rumah tangga keluarga besar, perempuan dan laki-laki yang lebih tua dapat membantu mengasuh anak sembari mereka masing-masing tetap bekerja di sektor ekonomi informal. Sang kakak juga dapat mengambil tanggung jawab pengasuhan adiknya. Anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghabiskan 50 persen lebih banyak waktu, atau total 120 juta jam lebih banyak setiap harinya, untuk melakukan pekerjaan rumah tangga daripada anak laki-laki seusianya.³⁷ Rumah tangga dengan orang tua tunggal, yang sebagian besar dikepalai oleh para ibu,³⁸ dan terutama para orang tua tunggal yang bekerja dalam sektor ekonomi informal, berada di bawah tekanan yang luar biasa. Penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan struktur keluarga yang beragam dalam mengembangkan layanan perawatan dan kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dan mendistribusikan kembali pekerjaan perawatan yang tidak dibayar. Dalam semua kasus ini, kita perlu memberikan kesempatan bagi pengasuh agar mereka memiliki situasi yang kondusif untuk memberikan perawatan pengasuhan bagi anak-anak mereka.

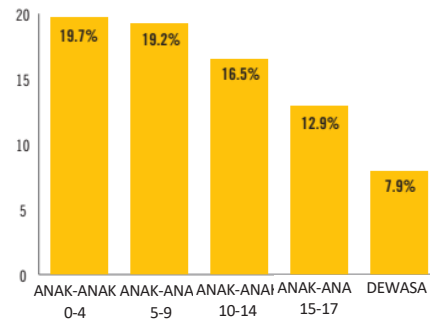
KOTAK 3: Pekerja pengasuh anak³⁹

Dalam sektor pengasuhan anak di sebagian besar negara, status pekerjaan dan kondisi kerja sangat beragam. Di saat beberapa pekerja pengasuhan anak dipekerjakan secara formal di pusat pengasuhan anak, seperti crèches dan pusat penitipan anak, para pekerja lainnya dipekerjakan secara informal dan tidak mendapatkan perlindungan. Misalnya, di banyak negara bagian India, anganwadi yang menjalankan pusat pengasuhan anak publik tidak dianggap sebagai pekerja sektor publik dan menerima honor tanpa akses ke skema jaminan sosial.

Ada juga pekerja usaha sendiri, baik dalam perekonomian formal maupun informal, yang menjalankan layanan pengasuhan anak berbasis rumahan. Relawan yang tidak dibayar dan pekerja yang membantu usaha keluarga dapat memberikan layanan pengasuhan anak dari rumah mereka sendiri maupun di pusat-pusat penitipan anak. Koperasi adalah penyedia layanan pengasuhan berbasis masyarakat (misalnya tempat penitipan anak, pengasuhan anak, pengasuhan anak dengan orang tua asuh (foster care) dan layanan kesehatan mental/perkembangan anak, dll.) untuk beragam populasi, seperti orang tua, anak-anak dan remaja, dan penyandang disabilitas atau penyakit tertentu (mental dan/atau fisik). Pekerja rumah tangga juga menyediakan layanan pengasuhan anak di rumah majikan mereka dan bisa jadi masuk dalam sektor ekonomi informal maupun formal. Pekerja rumah tangga migran yang melakukan perjalanan ke kota atau negara lain untuk mengasuh anak menanggung risiko lebih tinggi bekerja tanpa akses ke jaminan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

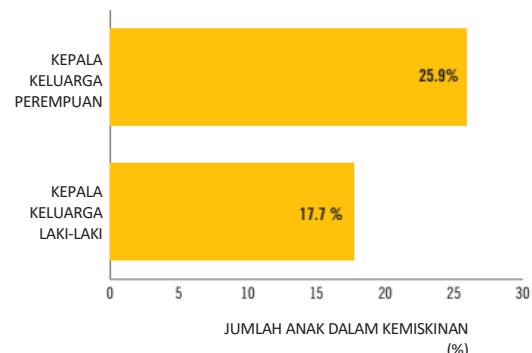
Sektor ini sangat didominasi oleh gender tertentu dan dicirikan dengan upah dan pendapatan yang rendah dengan akses terbatas ke jaminan sosial. Hal ini mencerminkan kurang dihargainya pekerjaan pengasuhan dan pandangan masyarakat umum bahwa pengasuhan anak merupakan pekerjaan perempuan, bukan sebagai pekerjaan terampil yang membutuhkan pelatihan dan kondisi kerja yang layak. Dalam situasi ini, kita juga perlu menyediakan pengasuhan anak berkualitas baik dengan menyediakan waktu, sumber daya, dan layanan yang dibutuhkan keluarga untuk mengasuh anak-anak mereka.

RISIKO KEMISKINAN PALING TINGGI DI ANTARA ANAK-ANAK PALING KECIL



Hampir 20 persen dari semua anak di bawah 5 tahun tinggal di rumah tangga sangat miskin pada tahun 2017 dibandingkan dengan 7,9 persen orang dewasa.

ANAK-ANAK YANG TINGGAL DI RUMAH TANGGA YANG DIKEPALAI OLEH PEREMPUAN LEBIH MUNGKIN UNTUK HIDUP DALAM KEMISKINAN EKSTREM



25,9 persen anak dalam rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan hidup dalam kemiskinan yang ekstrem, dibandingkan dengan 17,7 persen di rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.

Sumber: United Nations Children's Fund, "Impact of COVID-19 on Multidimensional Child Poverty," UNICEF, 2020. United Nations Children's Fund dan World Bank, *Global Estimate of Children in Monetary Poverty: an Update*, UNICEF, 2020.

Kurangnya inklusivitas terhadap disabilitas

Untuk keluarga yang pendapatannya berasal dari sektor ekonomi informal tetapi juga terdapat orang dewasa atau anak-anak penyandang disabilitas dalam rumah tangga, terdapat kesenjangan tertentu dan parah yang juga harus dipertimbangkan. Data yang ada menunjukkan kerentanan yang membuat anak-anak penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami hasil yang merugikan selama masa krisis. Dibandingkan dengan anak-anak tanpa disabilitas, anak-penyandang disabilitas:

- 57 persen lebih kecil kemungkinan untuk memiliki buku anak-anak di rumah mereka;
- 32 persen lebih kecil kemungkinan untuk membaca buku atau dibacakan buku di rumah; dan
- 1,7 kali lebih mungkin mengalami gejala infeksi saluran pernapasan akut.⁴⁰

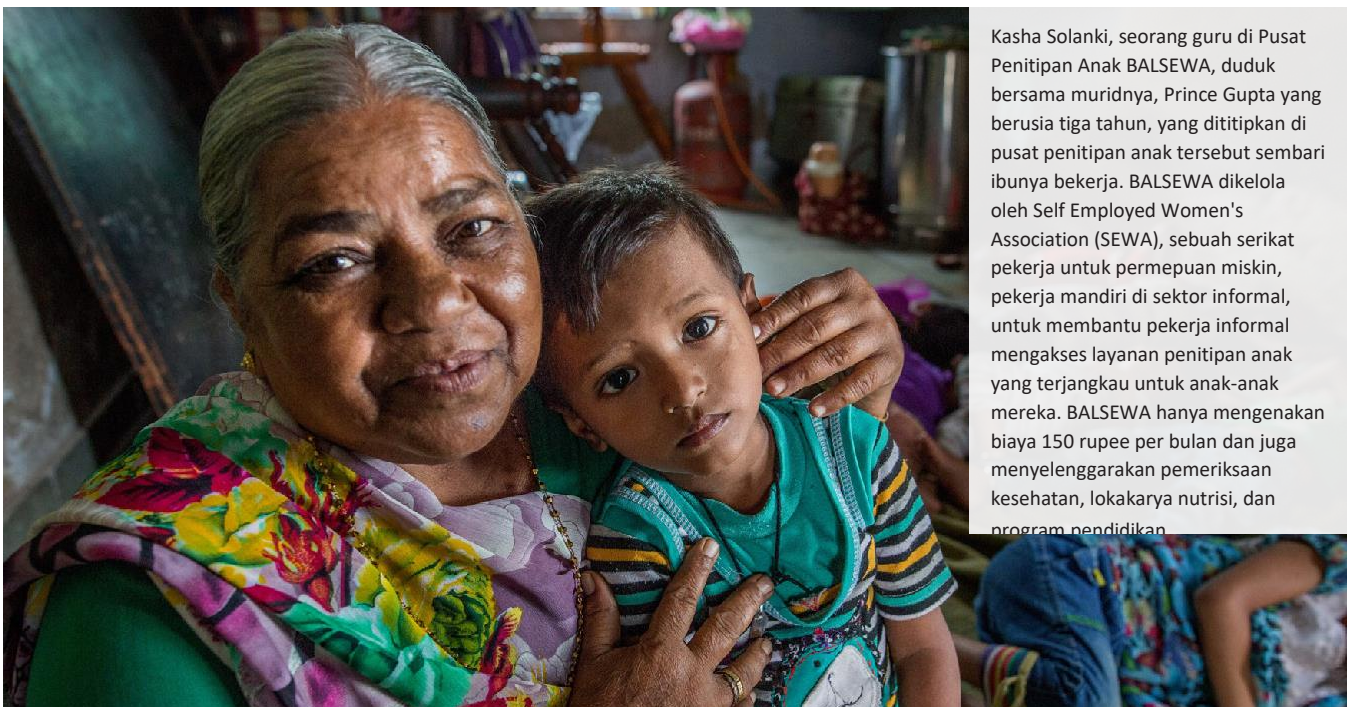
Pada 2018, hanya 27,8 persen penyandang disabilitas berat di seluruh dunia yang menerima tunjangan disabilitas⁴¹ dan hanya 9 persen dari langkah-langkah perlindungan sosial yang diumumkan sebagai tanggapan COVID-19 yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas.⁴² Namun, untuk mendukung orang dewasa dan anak-anak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, terdapat pula biaya langsung tertentu (seperti biaya untuk alat bantu, modifikasi rumah, dan pengeluaran tambahan untuk perawatan kesehatan) serta biaya tidak langsung yang harus diperhitungkan (seperti kesempatan kerja yang lebih sedikit dan pendapatan yang lebih rendah, masuk ke dalam sektor ekonomi informal).⁴³

Kita kekurangan data berkualitas baik tentang penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan keikutsertaan mereka di pasar tenaga kerja. Beberapa bukti menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka bekerja di sektor ekonomi informal⁴⁴ karena mereka menghadapi hambatan yang berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, diskriminasi, dan stigma dalam ekonomi formal – khususnya dalam konteks pekerjaan berpenghasilan rendah dan menengah yang sangat jarang masuk dalam kategori pekerjaan formal. Kebutuhan khusus kelompok ini menunjukkan adanya masalah sistemik dan mengakar yang sangat terkait erat dengan

jaminan sosial dan penyediaan perawatan yang hanya disediakan untuk sektor formal, dan kebutuhan mendesak untuk berinvestasi dalam sistem perlindungan dan perawatan sosial yang menjangkau semua pekerja dan keluarga mereka, termasuk mereka yang berada di sektor ekonomi informal, serta mereka yang berada di luar pasar tenaga kerja.

Kurangnya perlindungan kehamilan dan dukungan tempat kerja untuk menyusui

Kurangnya perlindungan kehamilan di sektor ekonomi informal juga mempengaruhi kemampuan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama enam bulan dan terus lanjut menyusui untuk melengkapi makanan padat sampai anak berusia dua tahun, sesuai rekomendasi dari World Health Organization. Pekerja rumah tangga perempuan dan pedagang informal di Afrika Selatan melaporkan bahwa mereka bekerja sampai melahirkan dan kembali dalam waktu kurang dari tiga bulan karena mereka perlu mendapatkan penghasilan.⁴⁵ Meskipun beberapa pemerintah telah memberlakukan undang-undang dan mengembangkan kebijakan untuk mendukung pemberian ASI di tempat kerja, peraturan tersebut seringkali mengacu pada kantor, pabrik atau perkebunan.⁴⁶ Peraturan perundang-undangan ini jarang beradaptasi dengan tempat kerja publik seperti jalan-jalan kota dan pasar atau rumah pemberi kerja swasta. Jikapun ada, kebanyakan situasinya tidak memungkinkan bagi perempuan untuk merasa aman, bermartabat, dan dapat mengakses fasilitas tersebut mengingat norma-norma sosial setempat. Dalam diskusi kelompok terfokus dengan pekerja informal perempuan di India dan Afrika Selatan, para ibu menyadari manfaat menyusui, tetapi tidak dapat menyusui selama periode yang direkomendasikan WHO.⁴⁷ Pedagang kaki lima dan pedagang pasar juga menyampaikan ketidaknyamanan mereka menyusui di depan umum di depan pelanggan dan menganggap tempat kerja mereka tidak aman atau tidak higienis untuk menyusui.⁴⁸



Kasha Solanki, seorang guru di Pusat Penitipan Anak BALSEWA, duduk bersama muridnya, Prince Gupta yang berusia tiga tahun, yang dititipkan di pusat penitipan anak tersebut sembari ibunya bekerja. BALSEWA dikelola oleh Self Employed Women's Association (SEWA), sebuah serikat pekerja untuk perempuan miskin, pekerja mandiri di sektor informal, untuk membantu pekerja informal mengakses layanan penitipan anak yang terjangkau untuk anak-anak mereka. BALSEWA hanya mengenakan biaya 150 rupee per bulan dan juga menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan, lokakarya nutrisi, dan program pendidikan.

KOTAK 4: Perlindungan dan dukungan maternitas, paternitas dan orang tua global dan tingkat cakupan tunjangan anak

Kurangnya perlindungan dan dukungan maternitas, paternitas dan orang tua bagi pekerja informal perempuan dan laki-laki menyebabkan hilangnya pendapatan dan penurunan tingkat kesehatan dan kesejahteraan ketika melahirkan atau merawat bayi. Hal ini juga berkontribusi pada tingkat kematian bayi yang lebih tinggi karena ibu hamil tidak mampu mengambil cuti kerja sebelum atau setelah melahirkan.⁴⁹ Di India, misalnya, perempuan pedagang kaki lima dan pekerja rumah tangga menyatakan bahwa mereka menjadi sumber pendapatan utama yang stabil di rumah tangga mereka karena suami mereka tidak bekerja, setengah menganggur atau memiliki pekerjaan tidak tetap. Oleh karena itu, mereka harus kembali bekerja segera setelah melahirkan anak-anak mereka. Berbeda dengan norma gender yang memperkuat peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama, dalam banyak kasus perempuan adalah pencari nafkah utama dan pengasuh utama, dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk pulih baik secara fisik maupun psikologis

dari persalinan sebelum kembali ke pekerjaan yang dibayar dan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar. Hal ini mengancam kesehatan perempuan dan kesejahteraan serta perkembangan anak-anaknya.

Tanpa akses ke langkah-langkah jaminan sosial seperti cuti kehamilan berbayar, cuti ayah dan orang tua, tunjangan anak dan keluarga dan pengasuhan anak gratis atau bersubsidi secara signifikan, orang tua dan keluarga yang bekerja di sektor ekonomi informal menanggung beban keuangan tambahan karena harus membesarkan anak tetapi di saat yang sama menanggung konsekuensi hilangnya penghasilan yang sangat mereka butuhkan.⁵⁰

Menurut perkiraan ILO baru-baru ini, kawasan dengan tingkat pekerjaan informal tertinggi untuk perempuan dan laki-laki juga merupakan kawasan dengan tingkat cakupan tunjangan kehamilan dan tunjangan anak terendah.

Kawasan	Anak-anak dalam kemiskinan ekstrim (dalam jutaan)	Perempuan dalam pekerjaan informal/total pekerjaan (%)	Laki-laki dalam pekerjaan informal/total pekerjaan (%)	Cakupan tunjangan anak (%) **	Tunjangan kehamilan (%)*
Sub-Sahara Afrika	234,1	89,7	82,7	11,4	14,5
Amerika	11,9 juta: (untuk kolom ini data hanya mengacu pada Amerika Latin dan Karibia)	39,2	40,5	61,0	57,0
Negara-negara Arab	10,8 (untuk kolom ini, data mencakup Timur Tengah dan Afrika Utara)	61,8	70,2	15,6	11,5
Asia dan Pasifik	24,2 (Asia Timur dan Pasifik) 64,3 (Asia Selatan)	64,1	70,5	18,0	44,9
Erropa dan Asia Tengah	10,2	23,6	26,4	79,8	81,9
Seluruh Dunia	355,5	58,1	63,0	26,4	44,9

Sumber International Labour Organization, *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*, 3rd ed., ILO, Jenewa, 2018; International Labour Organization, *World Social Protection Database*, ILO, Jenewa, 2021; International Labour Organization, ILOSTAT, 'The leading source of labour statistics', ILO, Jenewa, 2020; United Nations, 'World Population Prospects 2019' Department of Economic and Social Affairs, UN; The World Bank, *Global Estimate of Children in Monetary Poverty: An Update*, The World Bank, Washington, DC., 2020. (Berdasarkan perkiraan ini, pada tahun 2017, 17,5 persen anak-anak di seluruh dunia (atau 356 juta anak) di bawah usia 18 tahun hidup dengan kurang dari PPP \$1,90 per hari).

* Persentase ibu bersalin yang menerima santunan tunai bersalin dari total jumlah ibu bersalin (%), menurut kawasan, 2015 atau tahun terakhir yang tersedia

** Persentase anak dan rumah tangga yang menerima tunjangan anak dan keluarga, menurut kawasan, tahun terakhir yang tersedia

Dengan latar belakang risiko sistemik dan kemiskinan ini, sebagian besar pekerja di perekonomian informal, dan anak-anak mereka, tidak mendapatkan jaminan sosial, termasuk pekerja yang tidak memiliki dokumen lengkap, migran serta anak-anak mereka.⁵¹ Sehingga mereka seringkali tidak memiliki akses ke berbagai macam tunjangan seperti cuti bersalin, cuti ayah, cuti orang tua dan perlindungan hukum, tunjangan anak dan layanan pengasuhan

anak yang terjangkau dan berkualitas, akibat kegagalan pemberi kerja dan negara dalam menyediakan ketentuan yang memadai.⁵² Memang, pekerja informal seringkali merupakan "missing middle", karena mereka tidak diikutsertakan dalam skema jaminan sosial yang hanya mencakup pekerja yang berada di sektor ekonomi formal, serta tidak mendapatkan skema bantuan sosial yang ditargetkan pada kelompok yang sangat miskin dan kelompok rentan lainnya.

DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PEKERJA DI SEKTOR EKONOMI INFORMAL: KRISIS PENDAPATAN, PERAWATAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pekerja di sektor ekonomi informal menghadapi insiden kemiskinan dan kelaparan yang lebih tinggi di rumah tangga mereka karena penurunan pendapatan. Hilangnya jam kerja akibat pemerosotan ekonomi telah menyebabkan penurunan dramatis pendapatan tenaga kerja secara global sejak tahun 2019. Hal ini berarti menambah 108 juta pekerja yang saat ini sangat atau cukup miskin – hidup dengan pendapatan kurang dari \$3,25 per hari.⁵³ Dampak kemiskinan paling parah terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan di kalangan perempuan, di mana 42 persen perempuan di perekonomian informal bekerja di sektor-sektor yang telah diidentifikasi sebagai "berisiko tinggi" dibandingkan dengan 32 persen laki-laki di pekerjaan informal.⁵⁴ Misalnya, International Labour Organization memperkirakan bahwa 72 persen pekerja rumah tangga terdampak parah di seluruh dunia, 76 persen di antaranya bekerja di sektor informal.⁵⁵ Pekerja migran lebih berpotensi tidak mendapatkan langkah-langkah bantuan darurat apapun dan tidak memiliki jaminan sosial.⁵⁶

Putaran pertama survei longitudinal 12 kota oleh Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)⁵⁷ menyoroti bagaimana para pekerja di empat sektor utama – pekerjaan berbasis rumahan, pekerjaan rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pemulung – pada awalnya kehilangan penghasilan. Hampir 70 persen dari lebih dari 2.000 pekerja yang disurvei melaporkan tidak mendapatkan penghasilan sama sekali selama periode *lockdown* pertama pada April 2020.⁵⁸ Hanya 40 persen yang menerima segala bentuk bantuan langsung tunai atau bantuan berupa barang.⁵⁹ Akibatnya, banyak yang kembali bekerja di lingkungan berisiko tinggi dan setelah kebijakan *lockdown* dilonggarkan untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Di Accra, Ghana, seorang perempuan pedagang informal yang sedang 'mengasuh bayinya' melaporkan, "Saya berharap saya bisa tinggal di rumah untuk mengasuhnya sedemikian rupa sehingga saya dapat meninggalkannya untuk diasuh orang lain, tetapi saya tidak bisa melakukannya karena saya perlu mencari uang. Saat ini, dengan kondisi pandemi ini, memang cara terbaik adalah tetap tinggal di rumah dan mengasuhnya untuk menghidnari virus, tetapi saya tidak bisa melakukannya dan terpaksa membawanya ke pasar."⁶⁰

COVID-19 juga memperparah kerentanan pekerja di sektor ekonomi informal dan keluarga mereka dalam hal kesehatan dan keselamatan mereka, karena sebagian besar dari mereka sejak awal sudah terpapar risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih tinggi tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi hidup yang penuh sesak dan tidak sehat, kurangnya akses ke air mengalir dan alat pelindung diri, akses terbatas atau tidak ada akses ke perawatan medis, cuti berbayar, atau jaminan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan penting lainnya, dan ketidakmampuan untuk bekerja dari jarak jauh, dari berbagai faktor-faktor lain, meningkatkan penularan virus dan membahayakan para pekerja dan komunitas mereka.⁶¹ Faktor-faktor ini juga berkontribusi pada meningkatnya stigmatisasi terhadap para pekerja ini dan anak-anak mereka.

Seperti pada krisis ekonomi masa lalu, ekonomi informal diperkirakan akan terus tumbuh. Guncangan ekonomi dan gangguan pada rantai pasokan global kemungkinan akan mendorong lebih banyak pekerja berupah di ekonomi formal dan informal untuk menjadi pekerja mandiri di ekonomi informal, dan berbagai bukti yang muncul menunjukkan bahwa hal ini dapat lebih berpengaruh pada pekerja perempuan.⁶² Ini akan berdampak negatif pada pekerja dan keluarga mereka dan dapat berkontribusi pada peningkatan pekerja anak dan situasi penuh kekerasan.⁶³

Faktor penentu sosial dan ekonomi ini memiliki dampak besar pada gizi, kesehatan dan kesejahteraan para pekerja di sektor ekonomi informal dan pada anak-anak mereka saat mereka tumbuh dan berkembang. Menurut analisis UNICEF dan Save the Children, sekitar 1,2 miliar anak hidup dalam kemiskinan multidimensional pada tahun 2020 - tanpa akses ke layanan kesehatan, pendidikan, nutrisi, air dan sanitasi, serta perumahan. Angka ini merupakan peningkatan 15 persen dalam jumlah anak yang hidup dalam kondisi serba kekurangan di negara berpenghasilan rendah dan menengah, atau peningkatan 150 juta anak sejak awal pandemi COVID-19.⁶⁴

KOTAK 5: Estimasi kemiskinan, gender, dan perkembangan anak utama akibat pandemi COVID-19

- Di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah, tingkat kemiskinan di kalangan pekerja informal diproyeksikan meningkat dari 18 persen menjadi 74 persen pada tahun 2020 (ILO)
- Secara global, 247 juta perempuan berusia 15 tahun ke atas akan hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari, dibandingkan dengan 236 juta laki-laki. (UN Women)
- Kesenjangan kemiskinan gender paling dalam selama tahun-tahun reproduksi utama (25–34) dengan 60 juta perempuan, dibandingkan dengan 54 juta laki-laki, yang diperkirakan hidup dengan kurang dari PPP \$1,90 pada tahun 2021. (UN Women)
- Tambahan 137 juta orang dapat menghadapi kerawanan pangan akut pada akhir 2020, meningkat 82 persen dibandingkan dengan perkiraan pra-COVID dari orang-orang yang rawan pangan akut di dunia. (WFP)
- 6,7 juta balita dapat menderita tubuh kurus (wasting) selama tahun pertama pandemi, yang menyebabkan sekitar peningkatan 10.000 kematian anak per bulan (UNICEF dan WHO)
- Jumlah anak yang tinggal di rumah tangga miskin di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dapat meningkat 15 persen, mencapai 672 juta pada akhir tahun (UNICEF dan Save the Children)
- Di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, tambahan 150 juta anak hidup dalam kemiskinan multidimensional – tanpa akses ke layanan kesehatan, pendidikan, nutrisi, air dan sanitasi serta

Akibat pandemi, penutupan sekolah dan tempat penitipan anak pandemi telah secara tajam sehingga meningkatkan tanggung jawab pengasuhan rumah tangga bagi orang tua yang bekerja, terutama perempuan, serta adanya peningkatan gangguan terhadap layanan dukungan, termasuk bagi mereka yang merawat anak-anak penyandang disabilitas. Untuk menghadapi situasi ini, perempuan terpaksa putus sekolah atau mengurangi jam kerja dan pendapatannya berkurang karena kurangnya ketersediaan pengasuhan anak dan tekanan home-schooling – situasi yang memperkuat norma-norma regresif tentang distribusi pekerjaan perawatan yang tidak dibayar dan partisipasi tenaga kerja berbayar di antara laki-laki dan wanita. Meskipun tidak spesifik untuk ekonomi informal, penting untuk dicatat bahwa berbagai bukti dari Brasil, Chili, Kosta Rika, dan Meksiko menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki pasangan yang punya anak telah mengalami penurunan partisipasi angkatan kerja yang lebih tajam dalam daripada laki-laki akibat pandemi – dan hal ini terutama terjadi pada perempuan yang memiliki anak di bawah usia 6 tahun.

Penelitian dari UN Women dan IPSOS di 16 negara mengungkapkan, sebelum pandemi COVID-19, rata-rata waktu yang dihabiskan untuk pengasuhan anak oleh perempuan adalah sekitar 26 jam per minggu, namun sejak dimulainya pandemi, angka ini meningkat menjadi sekitar 31 jam. Laki-laki, di sisi lain, melaporkan menghabiskan sekitar 20 jam per minggu untuk pengasuhan anak sebelum krisis, dan sejak krisis meningkat menjadi 24 jam per minggu.⁶⁵ Bagi pekerja informal perempuan, yang selama ini sudah berjuang keras untuk memberi makan keluarga mereka, peningkatan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar ini semakin membatasi kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan yang dibayar dan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan mereka sendiri.

KOTAK 6: Pertimbangan bagi pekerja rumah tangga migran

Pekerja migran yang bepergian dari daerah pedesaan atau negara lain mungkin terpaksa meninggalkan anak-anak mereka yang masih kecil untuk dirawat oleh jaringan kerabat mereka. Untuk alasan ini, selain kebutuhan untuk mengakui bahwa pekerjaan pengasuhan bukan semata-mata pekerjaan ibu, kebijakan ramah keluarga juga harus mencakup manfaat jaminan sosial dan akses ke layanan publik (termasuk pengasuhan anak berkualitas baik) yang tidak semata-mata terikat pada ibu seorang anak, melainkan untuk pengasuh utama. Misalnya, negara-negara yang memiliki kebijakan ekonomi eksplisit untuk mendorong migrasi di antara pekerja informal perempuan, seperti Filipina, Nepal, dan Etiopia, juga harus menerapkan kebijakan ramah keluarga untuk mendukung anak-anak dari para pekerja yang dititipkan oleh ibunya ini.

Sebelum pandemi, tingkat migrasi di antara pekerja perempuan meningkat, menyiratkan bahwa banyak rumah tangga berpenghasilan rendah menghadapi tantangan pengasuhan dan pengasuhan jarak jauh. Selama pandemi, penutupan perbatasan negara dan kebijakan *lockdown* menambah beban signifikan pada pengasuhan anak bagi pekerja rumah tangga migran dan anak-anak mereka, dan banyak yang kehilangan pekerjaan di negara tujuan mereka sehingga tidak dapat mengirim uang untuk menghidupi anak-anak mereka di

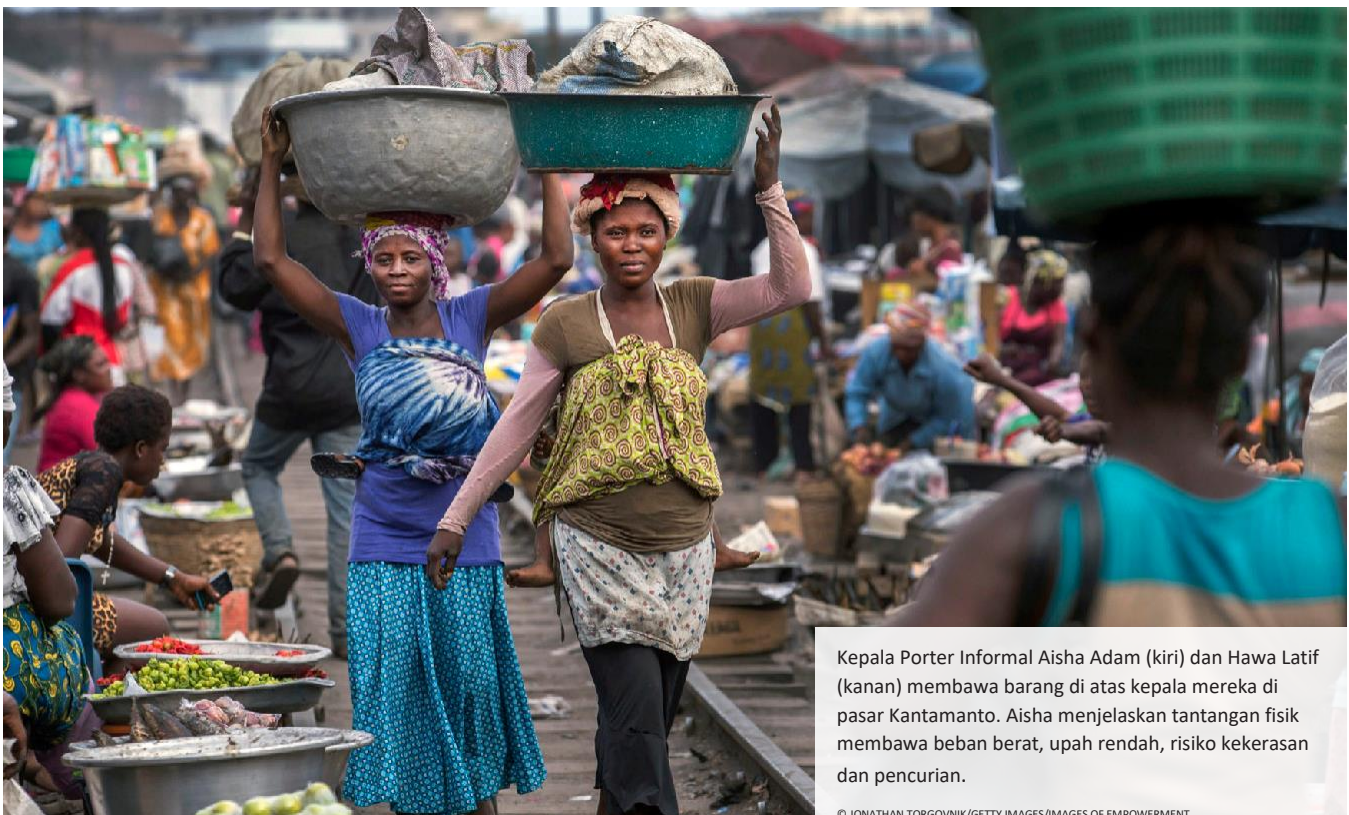
Di Argentina, perempuan yang memiliki anak menghabiskan 4,15 jam untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar selama *lockdown* dibandingkan dengan 2,43 jam untuk laki-laki yang memiliki maupun tidak memiliki anak.⁶⁶ Sekitar 57 persen perempuan yang memiliki anak melaporkan merasa lebih terbebani dengan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga sejak awal pandemi, dan hanya 45 persen melaporkan bahwa mereka mampu menyesuaikan tuntutan pekerjaan dan pengasuhan dengan baik.⁶⁹ Meskipun baik perempuan maupun

laki-laki mencatat adanya peningkatan beban kerja perawatan yang tidak dibayar selama periode *lockdown*, peningkatan ini bagi perempuan berada di atas distribusi tanggung jawab perawatan yang sejak awal sudah tidak merata dan merupakan kendala penting dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan dan partisipasi mereka dalam pekerjaan berbayar. Misalnya, di Afrika Selatan, 65 persen perempuan yang memiliki pekerjaan informal melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu pada April 2020 untuk mengasuh anak (dibandingkan dengan 58 persen laki-laki).⁷⁰ Ketika kebijakan *lockdown* dilonggarkan pada Juli 2020 dan layanan pengasuhan anak dibuka kembali, dua kali lebih banyak perempuan daripada laki-laki yang melaporkan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak mereka mencegah mereka kembali bekerja atau mencari pekerjaan.⁷¹ Selain itu, sektor pengasuhan anak di Afrika Selatan telah terpukul keras dan banyak penyedia layanan pengasuhan anak berbiaya rendah tidak dapat dibuka kembali setelah *lockdown* awal karena kehilangan pendapatan dan besarnya biaya untuk menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan baru.⁷² Penyedia layanan pengasuhan anak yang paling terdampak adalah mereka yang beroperasi di sektor ekonomi informal dan memberikan layanan kepada pekerja bergaji rendah di permukiman informal, daerah pedesaan dan permukiman miskin.

Dalam survei WIEGO di 12 kota terhadap pekerja informal di Afrika, Asia, Amerika Latin, Eropa, dan Amerika Utara, data menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki, dengan tanggung jawab pekerjaan perawatan tidak dibayar yang lebih tinggi, mengalami pengurangan jam dan hari kerja yang lebih besar daripada pekerja lain.⁷³ Pekerja informal perempuan yang melaporkan peningkatan tanggung jawab perawatan pada Juli 2020 hanya menghasilkan 40 persen

dari penghasilan mereka sebelum pandemi, dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki lain yang berpenghasilan setidaknya 60 persen dari penghasilan mereka sebelumnya. Fenomena ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan beban perawatan antara perempuan dan laki-laki dan kebutuhan akan investasi dalam infrastruktur perawatan untuk mendukung partisipasi dan pemberdayaan ekonomi. Isu-isu ini juga perlu diimbangi dengan pentingnya lingkungan pengasuhan bagi anak-anak agar potensi mereka berkembang sepenuhnya.

Analisis respons perlindungan sosial secara global terhadap pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa hanya 13 persen dari langkah-langkah ini yang ditujukan untuk mendukung keamanan ekonomi perempuan – sebagian besar dengan menargetkan mereka dengan bantuan langsung tunai atau barang; dan hanya 11 persen yang menangani peningkatan tuntutan perawatan yang tidak dibayar (seperti melalui cuti keluarga/pengasuhan khusus atau layanan pengasuhan anak).^{74,75} Selain itu, bahkan di negara-negara berpenghasilan tinggi dengan sumber daya yang lebih besar untuk menanggapi krisis sosial ekonomi, hanya 2 persen dari respons fiskal yang dialokasikan untuk kebijakan perlindungan sosial khusus anak, meskipun terdapat berbagai tantangan pengasuhan yang signifikan dan kerentanan tertentu yang dihadapi pengasuh dan anak-anak selama pandemi.⁷⁶ Ini adalah bukti dari beban signifikan yang dibebankan pada perempuan dan anak-anak selama pandemi tanpa adanya dukungan, serta hilangnya kesempatan dan adanya kesenjangan kritis di masa depan.



Kepala Porter Informal Aisha Adam (kiri) dan Hawa Latif (kanan) membawa barang di atas kepala mereka di pasar Kantamanto. Aisha menjelaskan tantangan fisik membawa beban berat, upah rendah, risiko kekerasan dan pencurian.

MENINGKATKAN DAN MEMPERLUAS KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA KEPADA PEKERJA DI EKONOMI INFORMAL: KOMPONEN PENTING DAN CONTOH KASUS NEGARA

S cakupan perlindungan sosial, termasuk kebijakan ramah keluarga, diabadikan dalam konvensi hak asasi manusia PBB dan standar perburuhan internasional. Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child atau CRC) menegaskan keluarga sebagai kelompok fundamental masyarakat dan lingkungan alamiah untuk pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya. Konvensi ini memberikan keluarga perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga dapat sepenuhnya memikul tanggung jawab dan hak-haknya dalam masyarakat. Dalam Pasal 18.3, tentang tanggung jawab orang tua, Konvensi ini secara eksplisit menyatakan: “Negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk memastikan bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari layanan dan fasilitas pengasuhan anak yang mereka berhak dapatkan.” Pasal 6 mengacu pada hak untuk hidup yang melekat pada anak dan kewajiban negara pihak untuk semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Komentar Umum Konvensi No. 7 menyebutkan kerentanan anak-anak kecil terhadap kemiskinan, diskriminasi, kehancuran keluarga dan kesulitan lain yang melanggar hak-hak mereka dan merusak kesejahteraan mereka. Pasal 26 mencatat hak setiap anak “untuk memperoleh manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial, dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai perwujudan penuh dari hak ini sesuai dengan hukum nasional masing-masing.” Pasal 4 mencatat bahwa “Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut dengan sumber daya yang tersedia semaksimal mungkin, dan bila diperlukan, dalam kerangka kerja sama internasional.”

Standar perburuhan internasional seperti Konvensi Perlindungan Maternitas ILO, 2000 (no. 183), Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (no. 156), Konvensi Jaminan Sosial (Standar Minimum), 1952 (no. 102) dan Konvensi Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial, 2012 (no. 202) juga memperluas hak atas kebijakan ramah keluarga dengan memasukkan perlindungan sosial bagi semua pekerja dan mereka yang tidak aktif secara ekonomi.⁷⁷ Rekomendasi ILO mengenai Transisi Ekonomi Informal ke Ekonomi Formal, 2015 (No. 204)

menyerukan kepada negara-negara Anggota untuk, “secara progresif memperluas, dalam undang-undang dan dalam praktiknya, kepada semua pekerja di ekonomi informal, jaminan sosial (dan) perlindungan kehamilan” (para. 18) [...] Negara anggota juga harus mendorong penyediaan dan akses ke pengasuhan anak dan layanan pengasuhan lainnya untuk mendorong kesetaraan gender dan memungkinkan transisi ke ekonomi formal (para. 21).⁷⁸

Penerapan standar-standar ini oleh Pemerintah merupakan bagian inti dari pemenuhan kewajiban hak asasi mereka.^{79,80} Hak atas perlindungan sosial juga diabadikan dalam komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya Tujuan TPB 1, untuk Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, yang disertai dengan Target 1.3, untuk mengimplementasikan sistem dan langkah perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat, termasuk batas dasar dan, pada tahun 2030, memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan, serta cakupan kesehatan semesta (target TPB 3.8) dan target lain yang terkait dengan perlindungan sosial (target 5.4, 8.5 dan 10.4).

Konferensi Perburuhan Internasional menyimpulkan pada Juni 2021 bahwa negara-negara harus “mengejar kebijakan perlindungan sosial yang responsif gender dan mengatasi kesenjangan gender dalam cakupan perlindungan sosial yang memadai, untuk memastikan bahwa sistem perlindungan sosial mengatasi risiko terkait gender selama perjalanan hidup, dan mempromosikan kesetaraan gender, termasuk dengan kredit perawatan dalam asuransi sosial dan dengan mendorong jaminan pendapatan selama cuti hamil, ayah dan orang tua, jika berlaku”; “berinvestasi dalam ekonomi pengasuhan untuk memfasilitasi akses ke pengasuhan anak yang terjangkau dan berkualitas serta layanan pengasuhan jangka panjang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan sosial, dengan mendukung partisipasi tenaga kerja pekerja dengan tanggung jawab pengasuhan dan pembagian pekerjaan perawatan yang setar antara perempuan dan laki-laki”; dan berinvestasi dalam perlindungan sosial bagi anak-anak, khususnya dengan tujuan untuk menghapuskan pekerja anak”.⁸¹

Nurturing Care Framework (Kerangka Kerja Pengasuhan) yang dikembangkan oleh WHO, UNICEF, dan Bank Dunia juga

menyoroti serangkaian kebijakan yang diperlukan agar anak-anak berkembang secara optimal dalam 1.000 hari pertama mereka.⁸² Kerangka kerja ini menegaskan kembali betapa pentingnya periode ini bagi kesehatan, pembelajaran, dan perkembangan sosial anak-anak seumur hidup mereka. Selain kebijakan ramah keluarga yang transformatif gender, kerangka kerja ini menyoroti perawatan kesehatan, nutrisi dan jaminan pendapatan sebagai hal yang penting untuk keamanan dan keselamatan. Dalam menghadapi krisis global ini, mustahil untuk merancang kebijakan ramah keluarga yang efektif bagi pekerja di perekonomian informal tanpa juga mempertimbangkan hilangnya pendapatan, risiko perawatan kesehatan, pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, dan meningkatnya insiden kelaparan. Oleh karena itu, ketika kita memikirkan fitur inti dari paket kebijakan "ramah keluarga" untuk era pasca-COVID-19, sangat penting bagi pemerintah untuk berinvestasi dalam perlindungan sosial yang transformatif gender, termasuk pengasuhan anak dan Kerangka Kerja Pengasuhan yang juga mencakup pekerja di sektor ekonomi informal.⁸³

Mengingat tantangan yang dihadapi pekerja informal, bagian ini meninjau kebijakan utama yang berkaitan dengan jaminan pendapatan dan manfaat perlindungan sosial khusus seumur hidup, cakupan perawatan kesehatan, layanan penitipan anak dan pendidikan anak usia dini yang terjangkau, mudah diakses, dan berkualitas, dan keamanan pangan dan gizi. Bagian ini mengidentifikasi praktik yang baik dalam memperkuat sistem dukungan bagi pekerja informal dan anak-anak mereka.⁸⁴

JAMINANAN PENDAPATAN

Jaminan pendapatan sangat penting untuk menyediakan pengasuh, anak-anak dan keluarga sumber daya yang mereka butuhkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Jaminan ini termasuk upah yang memadai untuk pekerja, termasuk pekerja rumah tangga dan pekerja pengasuhan anak; oleh karena itu, kebijakan pengupahan, termasuk kebijakan upah minimum, merupakan hal yang sangat penting. Kebijakan perlindungan sosial juga penting dalam melengkapi pendapatan dari pekerjaan dan untuk menjamin setidaknya jaminan pendapatan minimum – meliputi bantuan sosial dan melalui kontribusi jaminan sosial oleh pengusaha, pekerja dan pemerintah, serta perpajakan umum, sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi ILO tentang Jaminan Sosial (no. 102) dan Konvensi tentang Pekerja Rumah Tangga (no. 189).

Untuk pekerja mandiri di ekonomi informal, jaminan pendapatan sebagian diperoleh melalui jaminan akses ke alat produksi, kredit, input, dan tempat kerja mereka. Pedagang kaki lima dan pedagang pasar mencari perlindungan dari pengusuran paksa dan perampasan barang-barang mereka saat berdagang di ruang publik. Pekerja berbasis rumahan dan penyedia pengasuhan anak berbasis rumahan memerlukan kepemilikan legal di rumah mereka sebagai tempat kerja utama dan pengakuan hukum sebagai pekerja dalam undang-undang perburuhan. Jaminan pendapatan pemulung bergantung pada akses yang sama

terhadap barang daur ulang dan tender pengadaan pemerintah. Ketika akses ke kegiatan ekonomi mereka terancam, maka pendapatan langsung pekerja mandiri cenderung tidak terjamin seperti yang kita lihat dari fenomena penurunan pendapatan secara drastis selama *lockdown* dan meningkatnya kerawanan pangan. Seperti disebutkan sebelumnya, pekerja mandiri di sektor ekonomi informal cenderung tidak ikut serta dalam skema jaminan sosial karena mereka mungkin tidak diperbolehkan untuk mendaftar dan juga tidak mungkin memiliki pendapatan yang memadai dan rutin untuk membayar iuran.

Semua pekerja pada sektor ekonomi informal harus dilindungi oleh landasan perlindungan sosial yang ditetapkan secara nasional yang menjamin berbagai tunjangan (lihat di bawah). Rekomendasi ILO tentang Landasan Perlindungan Sosial (no. 202) terdiri dari setidaknya empat jaminan sosial berikut, sebagaimana didefinisikan di tingkat nasional:

1. akses ke perawatan kesehatan esensial, termasuk perawatan bersalin;
2. jaminan pendapatan dasar untuk anak-anak, tersedianya akses ke nutrisi, pendidikan, perawatan dan barang dan jasa lain yang diperlukan;
3. jaminan pendapatan dasar bagi penduduk usia aktif yang tidak mampu memperoleh penghasilan yang cukup, terutama karena sakit, menganggur, melahirkan dan memiliki disabilitas; dan
4. jaminan pendapatan dasar untuk orang tua.

Hal ini memastikan perlindungan dan ketahanan sepanjang perjalanan hidup, termasuk dalam menanggapi goncangan kovariat dan idiosinkratik. Banyak negara telah memperluas jangkauan skema jaminan sosial yang ada untuk menyalurkan dukungan kepada pekerja yang terkena dampak. Namun, bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai darurat, merupakan landasan respons perlindungan sosial terhadap pandemi, terutama yang disalurkan melalui sistem pemerintah pusat. Tujuan utamanya adalah untuk menjangkau pekerja informal yang kemungkinan besar tidak tercakup oleh langkah-langkah perlindungan sosial lainnya dan sangat terpukul oleh langkah-langkah pencegahan COVID-19. Sejak awal pandemi, 734 langkah-langkah transfer tunai diperkenalkan di 186 negara.⁸⁵ Namun, hanya sedikit yang secara eksplisit mengakui dan memberikan kompensasi atas hilangnya pendapatan perempuan dan meningkatnya tanggung jawab perawatan mereka, seperti disebutkan di atas.

CONTOH KASUS

Burundi: Proyek Dukungan Jaringan Sosial MERANKABANDI memberikan bantuan "tunai+" rutin kepada rumah tangga dengan anak-anak (0-12 tahun) yang hidup dalam kemiskinan ekstrim.⁸⁶ Program ini dibentuk oleh Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia, dengan dukungan teknis dari UNICEF. Sebagai pelengkap bantuan langsung tunai, kegiatan tambahan diberikan untuk mendukung kegiatan literasi keuangan dan peningkatan pendapatan, kesehatan dan gizi anak dan ibu serta

Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) (termasuk dukungan bagi orang tua dalam memberikan pengasuhan responsif dan pembelajaran dini). Pedoman-pedoman yang menyertainya mendorong pengasuhan bersama melalui keterlibatan aktif para ayah, dan mendukung pencatatan kelahiran tepat waktu. Pada tahun 2021, program ini akan berupaya untuk membuat ruang komunitas yang telah ada menjadi lebih ramah anak, termasuk area bermain mereka. UNICEF juga meninjau semua komponen yang terkait dengan program bantuan langsung tunai untuk meningkatkan responsivitas gender program tersebut.

Brazil: Dimulai pada April 2020, Pemerintah memperkenalkan *Auxilio Emergencial* (AE), tunjangan tunai darurat bagi orang-orang yang bukan merupakan pekerja berupah formal tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Program ini mencakup pekerja disektor ekonomi informal dan pekerja mandiri. Penerima bantuan langsung tunai *bersyarat Bolsa Familia* secara otomatis terdaftar dalam program tersebut jika tunjangan daruratnya lebih tinggi. Penerima manfaat diidentifikasi melalui sistem kependudukan nasional. Ada juga platform online untuk mendaftarkan mereka yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di basis data terpadu. Namun, beberapa organisasi pekerja informal yang mewakili pekerja rumah tangga, pedagang informal dan pemulung melaporkan tantangan dalam mengakses platform online dan mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan.

Skema bantuan langsung tunai di Brasil peka terhadap kebutuhan anak dengan mengaitkan jumlah uang yang ditransfer dengan ukuran rumah tangga – sehingga rumah tangga dengan anggota keluarga yang lebih banyak akan menerima dana yang lebih banyak. Ciri dari sensitif gender adalah nilai tunjangan berlipat ganda untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan anak tanggungan. AE telah berjalan selama lima bulan dengan menyediakan BRL 600 (\$106) dan tambahan empat bulan BRL 300 (\$53) untuk maksimal dua orang dewasa yang memenuhi syarat per keluarga.⁸⁷ Program ini menjangkau lebih dari 68 juta orang dan dianggap berhasil mencegah peningkatan ketimpangan dan kemiskinan yang lebih parah pada tahun 2020.⁸⁸ Meskipun program tersebut berakhir pada Desember 2020, Pemerintah menerapkan babak baru pada bulan April 2021 berupa BRL 250 (\$45); BRL 375 (\$67) untuk rumah tangga yang dikepalai perempuan yang memiliki tanggungan dan BRL 150 (\$27) untuk laki-laki lajang tanpa anak.⁸⁹

Thailand: Ketika kebijakan *lockdown* diberlakukan pada awal pandemi pada tahun 2020, Pemerintah memprakarsai skema bantuan langsung tunai baru dengan menyediakan 5.000 baht Thailand (\$160) per bulan untuk pekerja informal antara April dan Juni. Jumlah yang diberikan mewakili 37 persen dari PDB bulanan per kapita dan mendekati pendapatan bulanan rata-rata untuk pekerja informal di sebagian besar sektor.⁹⁰ Lebih dari 28 juta orang mengajukan permohonan bantuan langsung tunai.⁹¹ Jumlah pendaftar jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan Pemerintah, sehingga Pemerintah terpaksa merevisi target awalnya dari 3 juta

menjadi 16 juta pekerja informal – mewakili 45 persen dari angkatan kerja.⁹² Disediakan formulir pendaftaran online untuk pekerja informal yang mana sudah ditautkan ke database Pemerintah lainnya untuk memverifikasi informasi yang pendaftar berikan. Secara total, Pemerintah membelanjakan 1,4 persen dari PDB untuk program bantuan tunai ini.⁹³ Meskipun banyak pekerja informal mendapat manfaat dari tindakan ini, pekerja informal migran tidak dapat menikmati manfaat tersebut, dan durasi bantuan yang singkat kemungkinan akan membuat terbatasnya perlindungan rumah tangga pekerja informal dari kemiskinan.

Di luar langkah-langkah bantuan langsung tunai darurat, perempuan dan laki-laki dalam sektor ekonomi informal menyerukan rencana pemulihan ekonomi untuk memasukkan bantuan untuk dunia usaha, akses ke pasar dan strategi pasar tenaga kerja aktif yang secara khusus ditargetkan pada sektor pekerjaan mereka sehingga mereka dapat kembali memperoleh penghasilan atau menemukan peluang kerja baru.

TUNJANGAN ANAK UNIVERSAL

Bantuan langsung tunai adalah intervensi praktis yang terbukti dapat mengatasi kemiskinan bagi anak-anak dan keluarga. Bantuan ini meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan beragam hasil, termasuk kesehatan, gizi dan pendidikan. Penelitian terbaru oleh UNICEF dan Overseas Development Institute (ODI) menunjukkan bahwa investasi dalam bantuan langsung tunai universal di negara-negara berpenghasilan menengah akan berdampak pada pengurangan kemiskinan anak sebesar 20 persen ke atas.⁹⁴ Laporan ini memaparkan berbagai pilihan untuk melakukan upaya progresif menuju Tunjangan Anak Universal atau *Universal Child Benefits* (UCBs), dimulai dengan menargetkan kelompok usia 0 – 4 tahun, mengingat bahwa pendekatan universal terkait dengan pengurangan biaya administrasi, pengurangan error yang menyebabkan ketidakikutsertaan sasaran penerima manfaat dan pengurangan risiko perasaan malu dan stigmatisasi sebagai penerima manfaat. UCB telah terbukti menjadi langkah perlindungan sosial yang efektif dan redistributif pada saat krisis dan pada masa yang tidak terlalu bergejolak. Bukti kuat juga telah membuktikan bahwa bantuan langsung tunai⁹⁵ tidak menyebabkan penurunan lapangan kerja – sebaliknya, dukungan perlindungan sosial seperti tunjangan anak membantu orang tua menyeimbangkan kebutuhan keluarga mereka dengan tuntutan dan peluang yang terkait dengan pekerjaan berbayar.⁹⁶ Menerapkan UCB adalah satu langkah menuju sistem perlindungan sosial universal untuk merespons berbagai kebutuhan di berbagai fase di sepanjang kehidupan masyarakat.⁹⁷ Menerapkan UCB adalah satu langkah menuju sistem perlindungan sosial universal untuk merespons berbagai kebutuhan di berbagai fase di sepanjang kehidupan masyarakat.⁹⁷ Oleh karena itu, ini adalah kebijakan utama yang perlu dipertimbangkan dalam rencana pemulihan dan untuk kesejahteraan anak-anak dan keluarga, mengingat terjadinya peningkatan drastis angka kemiskinan selama pandemi COVID-19.

CONTOH KASUS

Mongolia: Setelah reformasi tunjangan anak universal tahun 2016, Mongolia sekarang memiliki tunjangan yang telah teruji kemakmurannya yang menjangkau sekitar 96,6 persen anak-anak di negara itu berkat respons COVID-19.⁹⁸ Tingkat cakupan tunjangan anak yang luas menjadikannya alat yang efektif untuk memberikan dukungan pendapatan dengan cepat kepada penerima manfaat terdaftar yang tinggal di rumah tangga miskin. Tunjangan bulanan "Program Uang Anak" (nilainya sebelum COVID MNT 20.000 per bulan) ditingkatkan menjadi MNT 100.000 (sekitar \$35) sebagai bagian dari langkah fiskal Pemerintah untuk merespons pandemi COVID-19. Tunjangan tersebut ditransfer ke setiap anak di Mongolia yang berusia di bawah 18 tahun. Kenaikan tingkat tunjangan tersebut awalnya diterapkan dari April hingga September 2020, kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2021; dan diperpanjang lagi sampai 1 Juli 2021.⁹⁹

Amerika Serikat: Sebagai tanggap pandemi dan untuk mengatasi kemiskinan anak yang sudah berlangsung lama dan pengucilan anak-anak yang terpinggirkan, Pemerintah memperluas Kredit Pajak Anak atau Child Tax Credit (CTC) yang telah ada selama setidaknya satu tahun. Sebelumnya, persyaratan untuk memperoleh CTC terkait dengan kewajiban pajak dan pendapatan – sehingga hanya menjangkau rumah tangga yang terafiliasi dengan pasar tenaga kerja formal. Implikasinya, lebih dari sepertiga dari seluruh anak di AS berada dalam keluarga yang berpenghasilan terlalu sedikit untuk mendapatkan kredit penuh. Ketimpangan ini sangat mencolok. Dengan undang-undang darurat, CTC telah diubah menjadi tunjangan anak universal yang teruji kemakmurannya, yang berarti bahwa 88 persen anak-anak sekarang akan menjadi penerima bantuan per 15 Juli 2021¹⁰⁰ selama satu tahun. Namun, sebagian anak imigran tidak dapat menerima CTC karena adanya Pemotongan Pajak dan Undang-Undang Pekerjaan 2017 yang mengharuskan anak-anak untuk memiliki Nomor Jaminan Sosial agar memenuhi syarat, sehingga anak-anak imigran yang memiliki Nomor Identifikasi Pajak Perorangan (ITIN) tidak dapat memperoleh CTC.¹⁰¹ Secara keseluruhan, perubahan tersebut meningkatkan CTC dari maksimum tahunan sebesar \$2.000, menjadi \$3.600 untuk anak di bawah usia 6 tahun, dan menjadi \$3.000 untuk anak usia 6 hingga 17 tahun, masing-masing meningkat sebesar 80 persen dan 50 persen. Akhirnya undang-undang mengizinkan Pemerintah untuk membayar tunjangan bulanan, bukan kredit lump-sum tahunan. Dengan diberikan rutin, hal ini berarti pendapatan yang mereka terima dapat diprediksi, sehingga bermanfaat untuk menetapkan standar hidup yang konsisten bagi keluarga dan untuk perencanaan masa depan. Perkiraan menunjukkan bahwa perluasan CTC akan mengurangi kemiskinan anak sebesar 45 persen, sedangkan CTC yang ada ditambah perluasan tersebut akan mengurangi kemiskinan anak absolut lebih dari setengahnya dibandingkan dengan baseline tanpa CTC. Saat ini undang-undang untuk membuat reformasi ini permanen sedang dipertimbangkan.¹⁰²

PERLINDUNGAN DAN DUKUNGAN MATERNITAS, PATERNITAS DAN ORANG TUA

Perlindungan dan dukungan maternitas, paternitas dan orang tua dapat memungkinkan perempuan untuk beristirahat dan pulih dari persalinan; menyusui sesuai dengan rekomendasi kesehatan dan bermanfaat bagi orang tua untuk merawat bayi mereka di bulan-bulan pertama ketika kedekatan antara pengasuh dan anak sangat penting untuk menjalin ikatan, nutrisi, dan perkembangan anak yang sehat. Hal ini juga berkontribusi untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Cuti ayah dan cuti orang tua juga merupakan alat kebijakan penting untuk melindungi dan mendorong pengasuh laki-laki untuk berpartisipasi secara aktif ikut mengasuh anak langsung maupun tidak langsung, dan ikatan dengan anak-anak di bulan-bulan awal, dan untuk memastikan distribusi pekerjaan pengasuhan yang lebih adil antara perempuan dan laki-laki.

CONTOH KASUS

Argentina: Konstitusi memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan hamil dan menyusui. Pemerintah telah melembagakan berbagai langkah perlindungan sosial, termasuk perlindungan kehamilan di tempat kerja, tunjangan keluarga iuran dan non iuran, dan pensiun untuk ibu. Kebijakan ini bersama-sama mempromosikan perlindungan kehamilan universal.

Argentina memperkenalkan dua tunjangan non-iuran masing-masing pada tahun 2009 dan 2011: Tunjangan Anak Universal (*Asignación Universal por Hijo*) dan Tunjangan Kehamilan (*Asignación por Embarazo*).¹⁰³ Tunjangan ini dibayarkan kepada pengusaha mikro yang terdaftar pada Rezim Pajak Sederhana untuk Wajib Pajak Kecil, pengangguran, pekerja di sektor ekonomi informal dengan pendapatan di bawah upah minimum, dan pekerja rumah tangga. Selama COVID-19, Pemerintah berupaya mempermudah persyaratan untuk mengklaim Tunjangan Anak Universal untuk sekitar 1 juta anak tambahan melalui:

- memperbolehkan anak keenam di antara populasi yang memenuhi syarat;
- pengurangan syarat waktu tinggal (dari 3 tahun menjadi 2);
- penangguhan sertifikasi persyaratan pada tahun 2020; dan
- implementasi sertifikat pra-pendaftaran.

Tunjangan anak universal disediakan untuk anak di bawah 18 tahun, dan jika digabung dengan tunjangan anak iuran, mencapai 85,5 persen anak-anak dan remaja.^{104,105,106} Tunjangan Kehamilan diberikan dari minggu kedua belas kehamilan hingga melahirkan atau

hingga selesainya periode kehamilan, dan melindungi pekerja perempuan di perekonomian informal selama kehamilan mereka dan saat mereka merawat bayi. Bantuan langsung tunai tersebut dilengkapi dengan akses pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga rentan melalui program SUMAR yang ditujukan untuk:

- menurunkan angka kematian anak dan ibu;
- memperkuat akses ke perawatan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja; dan
- meningkatkan perawatan menyeluruh yang diberikan kepada perempuan melalui pemeriksaan kesehatan rutin.

Sebagai respons atas pandemi, Pemerintah melembagakan peningkatan tingkat bantuan langsung tunai, setara dengan tambahan 3.100 Argentina (\$ 47) Tunjangan Anak Universal dan Tunjangan Kehamilan Universal untuk 4,3 juta orang.¹⁰⁷

Afrika Selatan: Cuti hamil dan tunjangan yang dibayar diberikan untuk pekerja berubah di sektor-sektor dengan tingkat informalitas yang tinggi, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja pertanian, melalui Dana Jaminan Pengangguran atau Unemployment Insurance Fund (UIF). Program ini inovatif karena memungkinkan iuran dari berbagai pemberi kerja untuk satu karyawan, yang memungkinkan pekerja rumah tangga paruh waktu yang memiliki beberapa majikan untuk mengakses skema tersebut. Majikan diwajibkan berdasarkan undang-undang jaminan sosial untuk mendaftarkan pekerja rumah tangga ke UIF. Namun, pengawasan tenaga kerja terbatas, dan pandemi ini memprihatinkan karena hanya sedikit sekali majikan yang mendaftarkan pekerja rumah tangga mereka untuk menerima dana tersebut. UIF menerima permohonan bantuan upah dari lebih dari 60.000 pekerja rumah tangga pada Oktober 2020, namun Survei Angkatan Kerja Afrika Selatan memperkirakan seharusnya ada hampir satu juta pekerja rumah tangga, sebagian besar di antaranya adalah perempuan.

Contoh-contoh dari Argentina dan Afrika Selatan menyoroti perlunya kombinasi antara tunjangan orang tua iuran dan non-iuran untuk menjangkau pekerja informal secara efektif. Dalam kasus Afrika Selatan, peningkatan kesadaran di antara majikan dan pengawasan ketenagakerjaan dapat mendorong lebih banyak majikan untuk mendaftarkan pekerja rumah tangga sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari jaminan sosial.

CAKUPAN KESEHATAN SEMESTA

Pandemi telah menyoroti beban sosial dan ekonomi yang sangat besar dari kurangnya investasi dalam sistem perawatan kesehatan dan dampak kehancuran akibat cakupan kesehatan yang tidak setara. Negara-negara dengan cakupan kesehatan semesta lebih mampu merespons dengan cepat dan efektif kebutuhan kesehatan

pekerja informal selama pandemi. Cakupan kesehatan semesta, dengan kondisi kerja yang layak bagi petugas kesehatan, sangat penting untuk kesejahteraan perempuan, anak-anak dan keluarga.

Di negara-negara di mana pekerja informal tidak ikut serta dalam skema perlindungan kesehatan^{108,109} seperti jaminan kesehatan, layanan kesehatan nasional dan dukungan kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial, diperlukan upaya segera untuk memperluas cakupan kesehatan kepada para pekerja ini dan rumah tangga mereka untuk membendung penyebaran virus.

CONTOH KASUS

Ghana: Hilangnya pendapatan para pekerja informal merupakan penghalang bagi keluarga untuk mampu membayar jaminan kesehatan. Di Ghana, pekerja informal perempuan melaporkan bahwa mereka tidak mampu membayar premi tahunan Jaminan Kesehatan Nasional, dan mereka serta anak-anak mereka tidak mendapatkan pertanggungjawaban.¹¹⁰ Namun, peserta program dalam program Pemberdayaan Mata Pencaharian Ghana Melawan Kemiskinan atau *Livelihood Empowerment Against Poverty* (LEAP) di bawah Kementerian Gender, Anak dan Perlindungan Sosial, bekerja sama dengan Otoritas Jaminan Kesehatan Nasional, telah memulai pendaftaran massal nasional untuk semua penerima LEAP di Skema Jaminan Kesehatan Nasional atau *National Health Insurance Scheme* (NHIS). Ini merupakan contoh bagaimana hubungan yang kuat antarprogram dapat memperluas dan menghilangkan hambatan terhadap layanan penting. Dana global dan nasional harus digunakan untuk memperkuat sistem jaminan kesehatan masyarakat untuk memastikan akses yang adil untuk semua orang.

Korea Selatan: Selama pandemi, Korea Selatan mencapai model Cakupan Kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) untuk sementara waktu dari segi tingkat populasi dan layanan yang dicakup oleh asuransi.¹¹¹ Korea Selatan mengadopsi perawatan kesehatan semesta wajib pada tahun 1982, menjadi fondasi yang kuat dalam merespons pandemi COVID-19 di negara mereka. Sekitar 97 persen warga Korea Selatan adalah penerima manfaat NHIS dan membayar premi NHIS sesuai dengan tingkat pendapatan atau nilai properti mereka. 3 persen lainnya adalah penerima Bantuan Kesehatan atau Medical Aid (MA) yang tidak mampu membayar iuran, sehingga biaya pengobatannya ditanggung oleh Pemerintah melalui pajak.¹¹² Uang yang dikeluarkan biasanya 20 persen untuk penerima NHIS dan 0–15 persen untuk penerima MA; Namun, karena pandemi, Pemerintah menghapuskan semua *cost sharing* terkait dengan layanan kesehatan untuk COVID-19.¹¹³ Dampaknya, Pemerintah Korea Selatan mencapai UHC nyata dan tanpa dipungut biaya sehingga mengurangi hambatan dalam akses ke perawatan dan meningkatkan kesiapsiagaan wilayahnya untuk keadaan darurat di masa depan.

Thailand: Kebijakan tentang UHC diberlakukan pada tahun 2002. Warga berhak atas layanan kesehatan esensial di semua tahap kehidupan dan berbagai manfaat, termasuk layanan

penting dalam perawatan preventif, kuratif dan paliatif.¹¹⁴ Sistem dan layanan kesehatan distrik yang terkoordinasi telah menghasilkan peningkatan pemanfaatan layanan dan berkontribusi pada rendahnya prevalensi kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk layanan rawat jalan dan rawat inap.¹¹⁵ Sebagai respons atas pandemi COVID-19, Thailand memperluas perlindungan finansial terhadap biaya kesehatan kepada warga negara dan penduduk asing yang memiliki izin kerja yang sah, dengan memberikan akses ke sistem cakupan semesta untuk pasien COVID-19 darurat. Langkah ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit umum atau swasta terdekat secara gratis, memperluas cakupan manfaat dan meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan.¹¹⁶

Pandemi telah menunjukkan betapa besar peran UHC yang tak ternilai dalam menghilangkan hambatan layanan, meningkatkan cakupan kesehatan dan mencegah individu dan keluarganya menderita kesulitan keuangan.

LAYANAN PENITIPAN ANAK PUBLIK DAN PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI YANG BERKUALITAS

Kita perlu memperluas dukungan pengasuhan anak kepada pekerja di ekonomi informal adalah gagasan tentang cakupan universal, oleh karenanya layanan pengasuhan anak berkualitas baik harus tersedia bagi semua yang membutuhkannya. Kebijakan dan layanan pengasuhan anak harus bersifat universal dan memberikan manfaat yang memadai dan setara bagi anak-anak, perempuan dan laki-laki serta pekerja pengasuhan. Memang, negara dapat memainkan peran ganda dan saling melengkapi dalam menentukan kualitas layanan, secara efektif mengatur layanan pengasuhan anak swasta dan nirlaba, memberikan pembiayaan serta menyediakan lapangan kerja untuk pekerja pengasuhan anak di fasilitas penitipan anak publik dan memberikan mandat upah yang memadai dan kondisi kerja yang layak. Negara juga dapat mencegah kebijakan pengasuhan anak yang dirancang dan diterapkan dengan buruk yang mana dapat memperburuk ketidaksetaraan.¹¹⁷

Bukti telah menunjukkan bahwa layanan pengasuhan anak berkualitas baik yang paling terjangkau dan dapat diakses oleh pekerja informal adalah layanan yang disediakan melalui subsidi publik dan penyediaan publik langsung. Bukti dari negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah menunjukkan bahwa layanan universal gratis lebih mungkin menjangkau kelompok yang kurang beruntung seperti pekerja perempuan di perekonomian informal, dan anak-anak mereka.¹¹⁸

CONTOH KASUS

Brazil: Koperasi Pemulung Asmare (*Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável*) didirikan di Belo Horizonte pada tahun 1990.¹¹⁹ Koperasi ini beranggotakan sekitar

100 anggota, yang semuanya adalah mantan pemulung yang bekerja di jalanan, dan 55 persen di antaranya adalah perempuan.¹²⁰ Koperasi mengumpulkan bahan-bahan dari sekolah, bisnis dan pemukiman. Antara tahun 1990 dan 2000, terdapat peluang politik yang penting di Brasil karena proses penganggaran partisipatif semakin banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Di Belo Horizonte, permintaan akan layanan pengasuhan anak untuk pemulung dari Asmare dipresentasikan pada majelis penganggaran partisipatif dan inisiatif ini akhirnya mendapatkan alokasi anggaran setelah beberapa tahun bernegosiasi dengan Pemerintah setempat. Karena dialog terbuka dengan administrator Pemerintah kota serta meningkatnya pengakuan kota atas tanggung jawab mereka untuk pendidikan dan pengasuhan anak usia dini, pemerintah kota mengambil alih pengelolaan dan pembiayaan pusat pengasuhan anak komunitas Koperasi Asmare. Koperasi ini kemudian menjadi bagian dari sistem PAUD kotamadya – *Unidades Municipais de Educação Infantil* (UMEI).

Jam buka disesuaikan jam kerja pemulung dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. 27 anggota staf profesional dan terlatih bekerja dengan empat shift untuk menjamin kualitas layanan pengasuhan anak yang baik dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja pengasuhan anak. UMEI menyediakan layanan bagi kurang lebih 80 anak, yang terbagi dalam empat kelompok usia: penitipan bayi, usia 1-2 tahun, usia 3-4 tahun, dan usia 5 tahun. UMEI juga memiliki asisten berkebutuhan khusus untuk anak-anak dengan Downs Syndrome, cerebral palsy, gangguan pendengaran dan autisme di pusat PAUD. Aksi kolektif dan kekuatan pemulung informal melalui Koperasi Asmare untuk menyuarakan tuntutan mereka memastikan UMEI terus memberikan layanan pengasuhan anak berkualitas baik kepada anak-anak mereka.¹²¹

Rwanda: Program Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) lintas batas didirikan sebagai respons atas munculnya masalah pengasuhan yang tidak memadai untuk anak-anak berusia 0 hingga 6 tahun di kota perbatasan Gisenyi di Distrik Rubavu. Para ibu meninggalkan anak-anak mereka dalam pengasuhan anak-anak lain di perbatasan saat menyeberang ke Republik Demokratik Kongo untuk berdagang selama rata-rata 8 hingga 10 jam per hari. Anak-anak yang dipercayakan dengan tanggung jawab ini, dengan biaya kecil, sering kali berusia sekolah dasar yang tidak bersekolah.

Untuk merespons hal ini, UNICEF Rwanda, bersama dengan Action pour le Développement du Peuple (ADEPE), mitra pelaksana LSM nasional, mendukung Pemerintah untuk menyediakan layanan PAUD kepada anak-anak pedagang lintas batas di dua PAUD. UNICEF Rwanda dan ADEPE belajar dari pengalaman PAUD lintas batas dan mendukung Pemerintah untuk mendirikan enam PAUD berbasis pasar di lima distrik. Pusat-pusat ini didirikan di dekat pasar masing-masing. Pengasuh perempuan yang berdagang di pasar meninggalkan anak-anak mereka di tempat penitipan anak yang aman dan stimulatif.

Hal ini memungkinkan ibu untuk menyusui secara berkala, sementara anak-anak mereka mendapat manfaat dari layanan PAUD yang difasilitasi oleh 66 pengasuh terlatih. PAUD pasar sejauh ini telah menjangkau 745 anak (332 laki-laki dan 413 perempuan) dengan layanan PAUD terintegrasi.¹²²

Contoh-contoh tersebut menggambarkan bagaimana layanan pengasuhan anak publik yang disediakan untuk keluarga berpenghasilan rendah sebelum pandemi dapat dibangun untuk menjamin dukungan berkelanjutan untuk pengasuh sehingga mereka dapat terus mendapatkan penghasilan sementara anak-anak mereka mendapat manfaat dari ruang yang lebih aman dan kualitas pengasuhan yang lebih baik.

BANTUAN SOSIAL DAN DUKUNGAN TEMPAT KERJA UNTUK MENYUSUI

Pandemi COVID-19 mengancam hilangnya kemajuan bertahun-tahun yang berhasil didapatkan dalam upaya meningkatkan gizi anak, terutama untuk populasi yang paling rentan dan terpinggirkan. Anak-anak yang tinggal di permukiman informal memiliki kerentanan tertentu di mana studi terbaru melaporkan bahwa di 44 persen negara, anak-anak di kuintil perkotaan termiskin memiliki prevalensi stunting yang lebih tinggi daripada anak-anak di daerah pedesaan, dan di 14 persen negara ini ketika dibandingkan dengan anak-anak di kuintil kekayaan terendah di daerah pedesaan.¹²³ Namun ada beberapa kebijakan dan langkah yang dapat diperkenalkan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko peningkatan kekurangan gizi, seperti penyediaan bantuan langsung tunai dan barang dan dukungan tempat kerja untuk menyusui.

Selain bantuan pangan darurat segera setelah pengumuman kebijakan *lockdown*, banyak pemerintah juga menajaki kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dalam jangka panjang untuk pekerja informal yang paling rentan dan anak-anak mereka di daerah perkotaan. Contohnya, di beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah, penjual bahan pangan mentah dan makanan matang ditunjuk sebagai pekerja penting untuk menjamin akses makanan di daerah perkotaan dan pedesaan berpenghasilan rendah.^{124,125} Usaha-usaha yang mempekerjakan pekerja informal dan berpenghasilan rendah juga dapat berkontribusi dengan membangun dukungan tempat kerja untuk menyusui termasuk dengan menyediakan ruang, fasilitas dan waktu bagi ibu untuk menyusui atau pemerah ASI untuk bayinya.

CONTOH KASUS

Burkina Faso: Pemerintah berkomitmen CFA 5 miliar (\$10 juta) untuk menyediakan bantuan langsung tunai bagi lima juta pedagang buah dan sayuran informal, yang sebagian besar adalah perempuan.¹²⁶ Pedagang yang menjual buah dan sayuran sangat terpukul oleh *lockdown* COVID karena stok jualannya mudah rusak. Kemudian diciptakan strategi dua arah untuk mendukung penjaja makanan dan rumah tangga mereka dengan mendorong mereka untuk mengisi kembali persediaan mereka dan menjual di daerah berpenghasilan rendah. Hal ini, pada gilirannya, memastikan ketahanan pangan yang lebih besar untuk semua rumah tangga lain di wilayah ini. Meskipun pekerja informal melaporkan tantangan dalam menerima bantuan langsung tunai, rancangan program tetap inovatif dan dapat disesuaikan dengan konteks negara lain.¹²⁷

India: Pemerintah mengumumkan penutupan sekolah dan pusat penitipan anak sebagai bagian dari kebijakan *lockdown*. Namun, banyak anak bergantung pada makan siang untuk ketahanan pangan mereka. Untuk merespons hal ini, Pemerintah negara bagian di Kerala menginstruksikan layanan Anganwadi (fasilitas penitipan anak umum) untuk memastikan makanan bergizi untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun dengan memberikan makan siang gratis kepada anak-anak yang terdaftar di bawah Layanan Pengembangan Anak Terpadu.¹²⁸ Di bawah instruksi dari Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Anak negara bagian tersebut, para pekerja Anganwadi juga mengirimkan bahan mentah setiap minggu kepada keluarga-keluarga di komunitas mereka. Selama periode ini, pekerja Anganwadi dikategorikan sebagai pekerja esensial dan terus mendapatkan gaji.

Tajikistan: Di Tajikistan, kemitraan antara UNICEF dan Bank Dunia mendukung model dan prosedur operasi standar untuk program perlindungan sosial darurat yang memfasilitasi pelaksanaan penyaluran bantuan tunai COVID-19 tambahan untuk keluarga dengan anak di bawah usia 2 tahun yang menghadapi kerawanan pangan. Keluarga dalam program ini juga menerima pesan penting tentang nutrisi dan pola asuh yang optimal.¹²⁹

Contoh-contoh ini menyoroti pentingnya berbagai jenis bantuan langsung tunai dan bantuan barang yang digunakan selama respons dan pemulihan pandemi. Selain bantuan tunai, langkah-langkah ini terbukti efektif dan dapat memungkinkan pemerintah untuk mengurangi risiko kerawanan pangan dan malnutrisi pada populasi yang rentan.

REKOMENDASI

Pandemi telah menyoroti kebutuhan untuk berinvestasi dalam perkembangan anak-anak, melindungi pendapatan pekerja perempuan, dan memperluas dan memperkuat dan berinvestasi dalam ekonomi perawatan dan sistem perlindungan sosial, termasuk kebijakan ramah keluarga esensial yang telah kita identifikasi sebelumnya untuk memastikan bahwa semua orang mendapat perlindungan, termasuk mereka yang paling rentan. Pandemi ini juga telah menunjukkan peran yang kompleks, menantang dan mendasar bahwa berbagai bentuk pengasuhan, termasuk pengasuhan anak, memainkan peranan dalam kehidupan keluarga di setiap masyarakat, baik yang terkait dengan ekonomi formal maupun ekonomi informal, untuk pekerjaan yang dibayar maupun tidak dibayar, untuk mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja dan untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan pengasuh. Bagi pekerja di sektor ekonomi informal, dan bagi perempuan sebagai pengasuh utama, dampak pandemi memerlukan pertimbangan kebijakan perlindungan sosial yang saling melengkapi dan layanan publik yang berkualitas, dan perlunya pendekatan holistik terhadap kebijakan yang ramah keluarga.^{130 131} Dalam konteks ini, terdapat langkah-langkah segera yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan dari populasi yang rentan, sembari mengurangi dampak dari pemerosotan ekonomi. Pada saat yang sama, langkah-langkah jangka panjang juga penting untuk melindungi masa depan anak-anak dan mewujudkan jendela kesempatan sekali dalam satu generasi yang dapat ditawarkan oleh krisis seperti pandemi ini, untuk menilai kembali dan merestrukturisasi masyarakat dan ekonomi secara mendasar. Tujuannya haruslah untuk mendukung pekerja di sektor ekonomi informal untuk mendapatkan kembali mata pencaharian mereka, dan untuk mempromosikan cakupan perlindungan sosial universal untuk semua, dan pengasuhan anak yang terjangkau, mudah diakses dan berkualitas sebagai bagian dari perbaikan ekonomi. Komponen-komponen ini sangat penting untuk ekonomi baru yang berpusat pada perawatan yang mengakui, menghargai, dan mendistribusikan kembali pekerjaan perawatan yang tidak dibayar, yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan, yang memungkinkan masyarakat kita terus bergerak, dan dalam banyak kasus, yang dapat mengatasi kesenjangan dalam perlindungan sosial yang lebih luas dan penyediaan layanan publik.

Rekomendasi ramah keluarga yang transformatif gender berikut berupaya untuk mengatasi krisis pengasuhan dan perlindungan sosial yang tidak memadai bagi pengasuh yang bekerja di sektor ekonomi informal, untuk menjamin sumber penghidupan mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk menyeimbangkan beban pekerjaan dengan tanggung jawab keluarga, dan memastikan kesejahteraan dan perkembangan mereka sendiri dan anak-anak mereka.

KASUS INVESTASI: PENDANAAN KEBIJAKAN RAMAH KELUARGA, PERLINDUNGAN SOSIAL DAN SISTEM PERAWATAN

Meskipun kita sepenuhnya menyadari kendala fiskal yang berat yang dihadapi pemerintah pusat dalam membuat berbagai pilihan sulit, rangkaian rekomendasi untuk perlindungan sosial pengasuhan anak, dan sistem pengasuhan yang lebih luas ini merupakan investasi dalam pembangunan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Negara-negara semakin menyadari efek multiplier yang ditawarkan oleh investasi dalam perlindungan sosial, di mana studi baru-baru ini menunjukkan bagaimana investasi 1 persen dari PDB di sektor ini dapat m 0,7–1,9 persen nilainya dalam pengembalian ekonomi, di samping jangka panjang investasi dalam pengurangan aspek multidimensi kemiskinan.¹³² Sumber daya publik yang dikeluarkan untuk mengurangi kemiskinan kronis, meningkatkan akses ke pengasuhan anak, meningkatkan hasil kesehatan dan hasil penting lainnya juga merupakan investasi dalam pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Demikian pula, investasi dalam infrastruktur perawatan menawarkan potensi keuntungan tiga kali lipat – menciptakan peluang kerja baru yang layak, meningkatkan kualitas Perkembangan Anak Usia Dini, kesehatan, gizi dan pendidikan, dan memungkinkan perempuan untuk lebih terlibat sepenuhnya di pasar tenaga kerja, termasuk transisi dari pekerjaan informal ke formal.^{133,134}



Menjamin non-diskriminasi, suara, representasi, dan dialog sosial

- Memastikan bahwa semua perlindungan sosial, pekerjaan, dukungan orang tua, kebijakan perawatan dan kebijakan ramah keluarga mencakup pekerja informal. Memastikan bahwa semua kebijakan mencegah diskriminasi dan mempertimbangkan dimensi gender dan kesetaraan dari pekerjaan informal dan pekerjaan perawatan yang tidak dibayar.
- Memperkuat pengawasan sistem perlindungan sosial dan perluasannya untuk pekerja informal melalui struktur tripartit (melibatkan perwakilan pekerja, pengusaha dan Pemerintah), dialog sosial, dan pelibatan organisasi pekerja informal.
- Membangun dan memanfaatkan platform nasional yang luas dan representatif dengan organisasi hak anak dan perempuan, organisasi pekerja informal, serikat pekerja dan pendukung ketahanan pangan yang menyerukan perluasan sistem perlindungan sosial – termasuk kebijakan ramah keluarga – agar dapat efektif mengatasi peningkatan angka kemiskinan, ketidaksetaraan gender, aksesibilitas dan kelaparan di antara pekerja miskin dan anak-anak mereka.
- Dukung orang tua dan pengasuh dengan menyediakan program, informasi, dan layanan pengasuhan anak dan kesehatan mental yang dapat diakses dan inklusif. Layanan harus mencakup sumber daya untuk pengasuh perempuan dan laki-laki untuk memberikan pengasuhan lebih baik untuk anak-anak mereka dan diri mereka sendiri dan memfasilitasi keterlibatan ayah dalam perkembangan anak-anak mereka. Layanan harus sesuai untuk, dan disesuaikan dengan, konteks budaya tertentu.

Membangun sistem perlindungan sosial, formalisasi dan memastikan dukungan pendapatan bagi pekerja informal

- Memperluas langkah-langkah jaminan sosial iuran dan bantuan sosial non-iuran untuk membangun sistem perlindungan sosial universal yang mencakup pekerja informal dan anak-anak dalam pengasuhan mereka. Berdasarkan standar ILO, program ini harus dibiayai secara progresif dan mencakup perlindungan kesehatan, pensiun, pengangguran, disabilitas,

tunjangan anak dan kehamilan serta cuti hamil dan cuti orang tua berbayar, untuk mendukung pekerja di perekonomian informal untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan perawatan mereka.

- Sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional, membangun landasan perlindungan sosial yang menjamin setidaknya akses ke perawatan kesehatan esensial dan jaminan pendapatan dasar untuk semua orang, selaras dengan Rekomendasi Landasan Perlindungan Sosial ILO, 2012 (No. 202) dan TPB 1.3.
- Secara progresif bergerak menuju penerapan cakupan universal tunjangan anak untuk membantu membiayai beban keuangan dalam membesarkan anak-anak untuk keluarga berpenghasilan rendah/tidak beruntung, untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam dukungan dan pengasuhan anak-anak, dan risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Mengaitkan program bantuan langsung tunai ini dengan komponen 'plus' yang transformatif gender dan peka terhadap anak yang mendukung pekerja sektor informal, orang tua/pengasuh dan keluarga.
- Pemerintah bekerja sama dengan pekerja informal dan organisasi mereka untuk memasukkan mereka ke dalam paket pemulihan perlindungan ekonomi dan sosial melalui dukungan untuk dunia usaha, akses ke pasar dan kebijakan pasar tenaga kerja aktif sehingga mereka dapat mengambil peluang kerja baru. Bagi pekerja informal perempuan, memulihkan pendapatan mereka ditambah dengan cakupan perlindungan sosial yang memadai dapat memberi mereka kendali lebih besar atas sumber daya rumah tangga, mengurangi dan mendistribusikan kembali tanggung jawab perawatan dan memungkinkan mereka mengumpulkan kembali tabungan yang hilang akibat pandemi.
- Mempromosikan langkah-langkah yang memadai untuk mendukung pekerja di ekonomi informal untuk transisi ke ekonomi formal sejalan dengan Rekomendasi ILO No. 204.

Memastikan akses ke layanan pengasuhan anak

- Layanan pengasuhan anak publik yang dapat diakses, terjangkau dan berkualitas adalah hak dasar dan komponen penting dari layanan publik, bersama dengan perawatan kesehatan dan pendidikan – dan Negara harus berinvestasi dalam layanan ini. Untuk menjangkau pekerja informal, desain dan implementasi layanan pengasuhan anak harus mempertimbangkan kebutuhan anak, kondisi dan kebutuhan kerja khusus orang tua (misalnya pekerja yang bekerja shift malam dan membutuhkan pengasuhan anak di malam hari, atau pekerja yang membutuhkan kedekatan dengan bayi mereka untuk terus menyusui).
- Sektor pengasuhan anak sangat terpuak oleh *lockdown* dan resesi ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan untuk pulih. Pemerintah harus meningkatkan investasi dan subsidi di fasilitas penitipan anak berbasis rumah dan pusat penitipan anak milik publik dan swasta dan memastikan bahwa layanan pengasuhan anak yang terjangkau dan berkualitas merupakan pilar utama dari rencana pemulihan ekonomi. Layanan ini harus difokuskan pada komunitas berpenghasilan rendah, pemukiman informal dan tempat kerja informal – untuk memastikan layanan ini mampu untuk tetap beroperasi, mengikuti pedoman kesehatan dan keselamatan, menerapkan standar kualitas dan melakukan semua protokol kesehatan yang diperlukan untuk membatasi paparan staf, anak-anak dan orang tua dari virus.
- Mengembangkan, memformalkan dan memperluas sektor pengasuhan anak dengan mempromosikan pelatihan, profesionalisasi dan hak untuk berorganisasi dan berunding tenaga bagi kerja pengasuhan anak. Hal ini memerlukan investasi dalam perluasan pekerjaan pengasuhan anak formal dan infrastruktur pengasuhan, meningkatkan kondisi kerja mereka dan meningkatkan upah atau pendapatan mereka, dan memberikan pelatihan untuk mendorong standar pengasuhan setinggi mungkin.
- Berinvestasi dan mempromosikan program Pengembangan Anak Usia Dini yang berkualitas baik dan program dukungan pengasuhan bagi keluarga pekerja sektor informal. Memastikan alokasi sumber daya dan anggaran untuk program dukungan pengasuhan anak bagi pekerja sektor informal.
- Menjamin akses ke layanan konseling dan perangkat informasi untuk orang tua yang bekerja di sektor ekonomi informal.

Menjamin akses ke perawatan kesehatan dan lingkungan kerja yang aman dan sehat

- Sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional, pemerintah harus menjamin UHC untuk semua, termasuk pekerja di sektor perekonomian informal dan anak-anak mereka. Berinvestasi sekarang dalam sistem perawatan kesehatan masyarakat yang berkualitas dengan pekerjaan perawatan berkualitas baik dalam jumlah yang memadai akan membuat negara lebih siap menghadapi guncangan kesehatan, iklim, dan ekonomi di masa depan.
- Mencegah dan mengatasi risiko tempat kerja tertentu yang memengaruhi pekerja di ekonomi informal dengan memperkuat dan memperluas langkah-langkah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pemberi kerja dan pekerja di sektor ekonomi informal.

Menjamin akses ke bantuan sosial dan dukungan tempat kerja untuk menyusui

- Menjamin ketahanan pangan di antara pekerja informal dan rumah tangga mereka merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung pengasuh dan menjamin peningkatan asupan gizi perempuan dan anak-anak. Strategi untuk mempromosikan ketahanan pangan melalui bantuan langsung tunai atau bantuan barang harus dirancang dengan mempertimbangkan pekerja informal untuk mendorong pemulihan mata pencaharian mereka melalui produksi pangan yang tahan terhadap iklim dan jaringan distribusi pangan lokal di daerah pedesaan dan perkotaan.
- Pemerintah dan sektor swasta dengan dukungan dari mitra dapat mendukung ibu menyusui di tempat kerja melalui pengembangan pedoman dan kebijakan untuk tenaga kesehatan, otoritas kota dan pengusaha yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pekerja informal perempuan di tempat kerja mereka (termasuk pasar, jalan-jalan kota dan majikan rumah tangga) untuk menyusui atau memeras ASI untuk bayi mereka.
- Berinvestasi dalam advokasi dan mempromosikan ruang yang aman dan kondusif bagi anak melalui penyediaan layanan terpadu yang dekat dengan tempat kerja pekerja informal – misalnya ruang menyusui yang aman dan higienis di pasar umum dan pusat transportasi utama, dan tempat penitipan bayi.

CATATAN AKHIR

- 1 International Labour Organization, 'Care work and Care Jobs for the Future of Decent Work', ILO, Jenewa, 2018 <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf>.
- 2 United Nations Children's Fund, 'UNICEF's Programme Guidance for Early Childhood Development', UNICEF, 2017 <https://sites.unicef.org/earlychildhood/files/FINAL_ECD_Programme_Guidance_September_2017.pdf>.
- 3 United Nations Children's Fund, 'Redesigning the workplace to be family-friendly: what governments and businesses can do', UNICEF, 2019 <<https://www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies>>; United Nations Children's Fund, 'Family-Friendly Policies Handbook for Business', Kantor Regional UNICEF Asia Timur dan Pasifik, Juni 2020 <<https://www.unicef.org/eap/media/5901/file/Family-Friendly%20Policies:%20Handbook%20for%20Business.pdf>>.
- 4 Definisi yang disepakati Social Protection Inter-Agency Cooperation Board
- 5 United Nations Children's Fund, 'UNICEF's Global Social Protection Programme Framework, Oktober 2019 <www.unicef.org/reports/global-social-protection-programme-framework-2019>.
- 6 Organisation for Economic Co-operation and Development dan International Labour Organization, 'Definitions of Informal Economy, Informal Sector and Informal Employment', dalam Tackling Vulnerability in the Informal Economy, OECD Publishing, Paris, 2019 <doi.org/10.1787/103bf23e-en>.
- 7 International Labour Organization, 'Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture', edisi ke-3, ILO, Jenewa, 2018 <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf>.
- 8 United Nations Children's Fund, 'UNICEF: An Additional 6.7 Million Children Under 5 Could Suffer from Wasting this Year due to COVID-19', 27 Juli 2020 <www.unicef.org/press-releases/unicef-additional-67-million-children-under-5-could-suffer-wasting-year-due-covid-19>.
- 9 United Nations, 'Universal Declaration of Human Rights', <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>>; ILO. 2021. 'Building Social Protection Systems: International Standards and Human Rights Instruments', <<https://www.social-protection.org/gimi/ShowResource.action?id=54434>>.
- 10 United Nations Children's Fund, 'Family-Friendly Policies and Other Good Workplace Practices in the Context of COVID-19: Key Steps Employers Can Take', 27 Maret 2020 <www.unicef.org/documents/family-friendly-policies-and-other-good-workplace-practices-context-covid-19-key-steps>.
- 11 United Nations Children's Fund, Redesigning the Workplace to be Family-Friendly: What Governments and Businesses can do, UNICEF, New York, Juli 2019 <www.unicef.org/early-childhood-development/family-friendly-policies>.
- 12 United Nations Children's Fund, Family Friendly Policies and the SDGS, Mei 2020.
- 13 International Labour Organization, 'COVID-19 and the World of Work: Updated Analysis and Estimates', edisi ke-3, ILO Monitor, Jenewa, 2020.
- 14 International Labour Organization, 'Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture', edisi ke-3, ILO, Jenewa, 2018 <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf>.
- 15 'Perempuan memang lebih terpapar pada pekerjaan informal di lebih dari 90 persen negara-negara Afrika sub-Sahara, 89 persen negara-negara dari Asia Selatan dan hampir 75 persen dari negara-negara Amerika Latin anggota International Labour Organization (ibid).
- 16 PBB, statistic DESA, 'Women and men in informal employment by sector', 2020, <<https://undesa.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=80c59f2ac4ac4ac457c8f5b4223992fb06f>>.
- 17 Ibid.
- 18 'Women and Men in the Informal Economy'.
- 19 Lund, Francie and Smita Srinivas, Learning from Experience: A Gendered Approach to Social Protection for Workers in the Informal Economy, International Labour Organization, Jenewa, Januari 2000.
- 20 International Labour Organization, 'World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2018 – Global Snapshot', ILO, Jenewa, Maret 2018.
- 21 International Labour Organization, 'Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience (Good Practice Guide)', ILO, Jenewa, 2021, <www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55728>.
- 22 International Labour Organization, 'Extending Social Security to Self-Employed Workers: Lessons from International Experience' Issue Brief, ILO, Jenewa, <<https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=55726>>.
- 23 International Labour Organization, 'Making Decent Work a Reality for Domestic Workers: Progress and Prospects Ten Years after the Adoption of the Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189)', ILO, Jenewa: International Labour Office, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_802551.pdf>; International Labour Organization, 'Social Protection for Domestic Workers: Key Policy Trends and Statistics', ILO, Jenewa, 2016.
- 24 International Labour Organization, 'Extending Social Security to Domestic Workers: Lessons from International Experience' Social Protection Spotlight, ILO, Jenewa 2021, <www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=55723>.
- 25 Moussié, Rachel, Women Informal Workers Mobilizing for Childcare, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Manchester, Februari 2017 <www.wiego.org/publications/women-informal-workers-mobilizing-child-care>.
- 26 Ibid.
- 27 Chen, Martha, 'The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies', Working Paper No.1, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Cambridge, Mass., 2012.

- 28 World Bank Group, 'Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune', Oktober, 2020.
- 29 International Labour Organization and Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'Quality Childcare Services for Workers in the Informal Economy, Policy Brief no. 1., ILO, Jenewa, 2020 <www.wiego.org/publications/quality-childcare-services-workers-informal-economy>.
- 30 International Labour Organization, 'Care work and Care Jobs for the Future of Decent Work', ILO, Jenewa, 2018 <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf>.
- 31 ILO dan WIEGO, 2020. "Quality childcare services for workers in the informal economy," Policy Brief No. 1 Joint production of the International Labour Office (ILO) and WIEGO. <https://www.wiego.org/publications/quality-childcare-services-workers-informal-economy>
- 32 Ibid.
- 33 UN Women, 'Progress of the World's Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights', UN Women, New York, 2015.
- 34 Devercelli, Amanda E. and Frances Beaton-Day, 'Better Jobs and Brighter Futures: Investing in Childcare to Build Human Capital', World Bank, Washington, DC., 2020 <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35062>>.
- 35 The Lancet, 'Advancing Early Childhood Development: from Science to Scale' Executive summary, Oktober 2016 <www.thelancet.com/pb-assets/Lancet/stories/series/ecd/Lancet_ECD_Executive_Summary.pdf>.
- 36 Gromada, Anna; Richardson, Dominic (2021). Where Do Rich Countries Stand on Childcare?, Innocenti Research Report UNICEF Office of Research - Innocenti, Florence < <https://www.unicef-irc.org/publications/1203-where-do-rich-countries-stand-on-childcare.html>>
- 37 United Nations Children's Fund, 'Harnessing the Power of Data for Girls: Taking stock and looking ahead to 2030', UNICEF, New York, Oktober 2016 <<https://data.unicef.org/resources/harnessing-the-power-of-data-for-girls/>>.
- 38 PBB, Patterns and Trends in Household Size and Composition: Evidence from a United Nations Dataset, UN Department of Economic and Social Affairs Population Division, New York, 2019 <www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/household_size_and_composition_technical_report.pdf>.
- 39 International Labour Organization and Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'Extending Childcare Services to Workers in the Informal Economy: Policy Lessons from Country Experiences', Policy Brief no. 3. ILO, Jenewa, 2020 <https://www.ilo.org/global/WCMS_737555/lang-en/index.htm>.
- 40 UNICEF, Children with disabilities: Ensuring their inclusion in COVID-19 response strategies and evidence generation, 2020 <<https://data.unicef.org/resources/children-with-disabilities-ensuring-inclusion-in-covid-19-response/>>.
- 41 International Labour Organization, World Social Protection Report: Universal Social Protection to Achieve the SDGs, 2017-2019, ILO, Jenewa, 2017.
- 42 International Labour Organization dan United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities, 'Social Protection Measures for Persons with Disabilities and their Families in Response to Covid 19 crisis: an Updated Overview of Trends', ILO, Jenewa, 2021.
- 43 Meskipun kesenjangan upah mungkin tidak terlalu lebar untuk konteks kelompok berpenghasilan rendah.
- 44 Mitra, Sophie, and Usha Sambamoorthi, 'Employment of Persons with Disabilities: Evidence from the National Sample Survey', Economic and Political Weekly, vol. 41, no. 3, hlm. 199-203, 2006.
- 45 Horwood, Christiane, dkk., 'A Descriptive Study to Explore Working Conditions and Childcare Practices among Informal Women Workers in KwaZulu-Natal, South Africa: Identifying Opportunities to Support Childcare for Mothers in Informal Work', BMC Pediatrics, vol. 19, no. 382, 2019.
- 46 United Nations Children's Fund, 'Breastfeeding Support in the Workplace: a Global Guide for Employers, UNICEF, 2020.
- 47 Horwood, Christiane, dkk., 'Attitudes and Perceptions about Breastfeeding among Female and Male Informal Workers in India and South Africa', BMC Public Health vol. 20, no. 875, 2020.
- 48 Ibid.
- 49 United Nations Children's Fund, 'Maternidad y Paternidad en el Lugar de Trabajo en América Latina y el Caribe — Políticas para la Licencia de Maternidad y Paternidad y Apoyo a la Lactancia Materna', UNICEF, 2020, <www.unicef.org/lac/media/13931/file/Maternidad_y_paternidad_en_el_lugar_de_trabajo_en_ALC.pdf>
- 50 'Quality Childcare Services for Workers in the Informal Economy'.
- 51 International Labour Organization, 'World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection Policies to Achieve the Sustainable Development Goals', ILO, Jenewa, 2017.
- 52 United Nations Children's Fund Office of Research and Innocenti, 'Childcare in a Global Crisis: The Impact of COVID-19 on Work and Family Life', UNICEF, Florence, 2020.
- 53 International Labour Organization, 'World Employment and Social Outlook', ILO, Jenewa, 2021.
- 54 'COVID-19 and the World of Work'.
- 55 International Labour Organization, 'Impact of the COVID-19 Crisis on Loss of Jobs and Hours Among Domestic Workers', ILO, Jenewa, 2020.
- 56 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'Impact of Public Health Measures on Informal Workers Livelihoods and Health', WIEGO, 2020 <www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/Impact_on_livelihoods_COVID-19_final_EN_1.pdf>; International Labour Organization, 'Social Protection for Migrant Workers: A Necessary Response to the COVID-19 Crisis,' ILO, Jenewa, 2020, <<https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56783>>.
- 57 Sebuah studi longitudinal 12 kota yang dikoordinasikan oleh WIEGO menilai dampak krisis COVID-19 terhadap lebih dari 2.000 pekerja informal dan rumah tangga mereka. Dengan menggunakan kuesioner survei dan wawancara mendalam, Putaran 1 menilai dampak krisis pada April 2020 (periode puncak pembatasan di sebagian besar kota) dan pada Juni/Julai 2020 (ketika pembatasan telah dilonggarkan di sebagian besar kota) dibandingkan dengan Februari 2020 (sebelum COVID-19). Putaran 2 akan menilai dampak berkelanjutan versus tanda-tanda pemulihan pada paruh pertama tahun 2021.

- 58 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'COVID-19 Crisis and the Informal Economy Study: Policy Insights', WIEGO, Manchester <www.wiego.org/covid-19-crisis-and-informal-economy-wiego-impact-study-global-findings-policy-insights>, diakses pada 19 Juni 2021.
- 59 Alfors, Laura, Ghida Ismail and Marcela Valdivia, 2021. Informal Workers and the Social Protection Response to COVID-19: Who got relief? How? And Did It Make a Difference? WIEGO COVID-19 Crisis and the Informal Economy Policy Insights no. 2. Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Manchester, 2021 <www.wiego.org/covid-19-crisis-and-informal-economy-study-policy-insights>.
- 60 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'Results of Survey on Childcare Constraints among Women Informal Traders in Accra, Durban and Nakuru During the Covid-19 Pandemic', WIEGO, Manchester, akan datang.
- 61 International Labour Organization, 'COVID-19 Crisis and the Informal Economy', ILO Brief, ILO, Jenewa, Mei 2020 <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/briefingnote/wcms_743623.pdf>; International Labour Organization, 'Extending Social Protection to Informal Workers in the COVID-19 Crisis: Country Responses and Policy Considerations'. Social Protection Spotlight, ILO, Jenewa, 2020 <<https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56833>>.
- 62 International Labour Organization, 'World Employment and Social Outlook: Trends 2021', ILO, Jenewa, 2021.
- 63 International Labour Organization and United Nations Children's Fund, 'Covid-19 And Child Labour: A Time Of Crisis, A Time To Act', ILO, Jenewa, 2020.
- 64 Save the Children and United Nations Children's Fund, 'Impact of COVID-19 on Multidimensional Child Poverty', technical note, UNICEF, 2020 <<https://data.unicef.org/resources/impact-of-covid-19-on-multidimensional-child-poverty>>.
- 65 UN Women, 'Whose Time to Care? Unpaid Care and Domestic Work During COVID-19', November 2020.
- 66 International Domestic Workers Federation, 'The Impacts of COVID-19 on Domestic Workers and Policy Responses', IDWF, 2020 <https://idwfed.org/en/covid-19/the-idwf/advocacy/idwf-policy-brief_final-eng.pdf>.
- 67 'Covid-19 And Child Labour'.
- 68 Costoya, Victoria dkk., 'The Impact of COVID-19 in the Allocation of Time within Couples: Evidence for Argentina', Working Papers 145, Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 2020 <<https://ideas.repec.org/p/sad/wpaper/145.html>>.
- 69 United Nations Children's Fund, 'COVID-19 Rapid Assessment Impact of the COVID-19 Pandemic on Families with Children and Adolescents', Third Round – Findings Report UNICEF, November 2020 <www.unicef.org/argentina/media/9701/file/Rapid%20Assessment%20on%20COVID-19%20impact%20on%20children%20and%20families%20in%20Arg-%203rd%20round.pdf>.
- 70 Casale, Daniela, and Debra Shepherd, 'The Gendered Effects of the Ongoing Lockdown and School Closures in South Africa, Evidence from NIDS-CRAM Waves 1 and 2', National Income Dynamics Study – Coronavirus Rapid Mobile Survey, Cape Town, 2020.
- 71 Casale, Daniela, and Dorrit Posel, 'Gender and the Early Effects of the COVID-19 Crisis in the Paid and Unpaid Economies in South Africa', Wave 1, National Income Dynamics Study – Coronavirus Rapid Mobile Survey, Cape Town, 2020.
- 72 Wills, Gabrielle, Janeli Kotze and Jesal Kika-Mistry, 'A Sector Hanging in the Balance: ECD and Lockdown in South Africa', Wave 2, National Income Dynamics Study – Coronavirus Rapid Mobile Survey, Cape Town, 30 September 2020.
- 73 Ogando, Ana C., Michael Rogan, and Rachel Moussié, 'The Triple Crisis: Impact of COVID-19 on Informal Workers' Care Responsibilities, Paid Work and Earnings', Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Manchester, Maret 2021 <www.wiego.org/resources/triple-crisis-impact-covid-19-informal-workers-care-responsibilities-paid-work-and>.
- 74 United Nations Development Programme and UN Women, 'COVID-19 Global Gender Response Tracker', 2021 <<https://data.undp.org/gendertracker>>.
- 75 'Whose time to care?'
- 76 United Nations Children's Fund, 'Supporting Families and Children Beyond COVID-19: Social protection in High-Income Countries', UNICEF, Desember 2020.
- 77 International Labour Organization, 'Building Social Protection Systems: International Standards and Human Rights Instruments', ILO, Jenewa, 2021 <www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action?id=57183>.
- 78 International Labour Organization, 'The ILO Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204)', <https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204>.
- 79 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'Labour and Human Rights Frameworks Promoting Childcare for all Workers', WIEGO, Manchester, 2020.
- 80 Konvensi hak asasi manusia yang relevan, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- 81 Resolusi tentang pembahasan berulang kedua tentang perlindungan sosial (jaminan sosial), 19 Juni 2021, butir 12(f), (g) dan (h) <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_806099.pdf>.
- 82 **The Nurturing Care Framework (NCF)** dikembangkan pada tahun 2018 sebagai upaya multi-mitra (WHO, UNICEF, World Bank Group, Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) dan Early Childhood Development Action Network (ECDAN). Ini menggambarkan bagaimana program yang ada dapat ditingkatkan menjadi lebih komprehensif dalam menangani kebutuhan anak kecil. Ia memiliki fokus khusus pada periode dari pembuahan hingga usia tahun 3, karena ini adalah waktu ketika perkembangan otak sangat sensitif terhadap pengaruh eksternal. Meskipun kerangka ini berfokus pada kelompok usia 0–3 tahun, prinsip ini berlaku untuk semua kelompok umur.
- 83 United Nations Children's Fund, 'COVID-19: Number of Children Living in Household Poverty to Soar by up to 86 Million by End of Year', rilis pers, UNICEF, New York, 28 Mei 2020 <www.unicef.org/press-releases/covid-19-number-children-living-household-poverty-soar-86-million-end-year>.

- 84 International Labour Organization, 'Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience' Good Practice Guide, ILO, Jenewa, 2021 <www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55728>. – 'Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International Experience', Policy Resource Package, ILO, Jenewa, 2021 <<https://informaleconomy.social-protection.org>>. –, 'Extending Social Security to Self-Employed Workers: Lessons from International Experience', Issue brief, <www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?id=55726>.
- 85 The World Bank and United Nations Children's Fund, 'Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures', Mei 2021; International Labour Organization, 'COVID-19 Social Protection Monitor,' <<https://www.social-protection.org/gimi/ShowWiki.action?id=3417>>.
- 86 The World Bank, 'BI-Social Safety Nets (Merankabandi)', The World Bank, 2021 <<https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P151835>>.
- 87 'Social Protection and Jobs Responses to COVID-19'.
- 88 Blofield, Merike, Nora Lustig and Mart Trasberg, 'Social Protection During the Pandemic, Argentina, Brazil, Colombia and Mexico', CGD note no. 11, Center for Global Development, 2021 <www.cgdev.org/sites/default/files/Note-Blofield_Lustig_Trasberg-Revised_0.pdf>.
- 89 'Social Protection and Jobs Responses to COVID-19'.
- 90 The World Bank, 'Thailand Economic Monitor, Restoring Incomes and Recovering Jobs', The World Bank, Washington DC., 2021. <<https://documents1.worldbank.org/curated/en/236271611069996851/pdf/Thailand-Economic-Monitor-Restoring-Incomes-Recovering-Jobs.pdf>>.
- 91 The World Bank, 'Scaling Up Social Assistance Payments as Part of the COVID-19 Pandemic Response', The World Bank, Washington DC., 2020 <<https://thedocs.worldbank.org/en/doc/655201595885830480-0090022020/original/WBG2PxScalin-gupSocialAssistancePaymentsasPartoftheCovid19PandemicResponse.pdf>>.
- 92 International Labour Organization and United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 'Social Protection Responses to COVID-19 in Asia and the Pacific: The Story so Far and Future Considerations' ILO, Agustus 2020. <www.ilo.org/asia/publications/WCMS_753550/lang--en/index.htm>.
- 93 'Thailand Economic Monitor, Restoring Incomes and Recovering jobs'.
- 94 Bastagli, Francesca dkk., 'Universal Child Benefits: Policy Issues and Options', United Nations Children's Fund and Overseas Development Institute, Juni 2020.
- 95 Overseas Development Institute, 'Cash transfers: What Does the Evidence Say? A Rigorous Review of Impacts and the Role of Design and Implementation Features', ODI, London, 2016.
- 96 United Nations Children's Fund and Overseas Development Institute, 'Universal Child Benefits: Policy Issues and Options', UNICEF, New York, 2020 <www.unicef.org/reports/universal-child-benefits-2020>.
- 97 International Labour Organization and United Nations Children's Fund, 'Towards Universal Social Protection for Children: Achieving SDG 1.3', 2019 <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_669336.pdf>.
- 98 United Nations Children's Fund, 'Half a Billion US dollars Leveraged for Children in Mongolia During the COVID-19 Pandemic, Child Money Programme', UNICEF Mongolia, Februari 2021 <www.unicef.org/mongolia/stories/half-billion-us-dollars-leveraged-children-mongolia-during-covid-19-pandemic>.
- 99 'Social Protection and Jobs Responses to COVID-19'.
- 100 Internal Revenue Service, IRS, Treasury Announce families of 88 percent of Children in the U.S. to Automatically Receive Monthly Payment of Refundable Child Tax Credit', IRS, Washington <www.irs.gov/newsroom/irs-treasury-announce-families-of-88-percent-of-children-in-the-us-to-automatically-receive-monthly-payment-of-refundable-child-tax-credit>.
- 101 Minoff, Elisam, 'Advancing Equity through the American Rescue Plan's Child Tax Credit, Laying the Foundation for a Child Allowance', Center for the Study of Social Policy, Maret 2021 <<https://cssp.org/wp-content/uploads/2021/03/Policy-Advancing-Equity-Through-One-Year-CTC-Expansion.pdf>>.
- 102 Richardson, Dominic dkk., 'Child Benefits in the US — For Children Here, There, and Everywhere', Development Pathways, November 2021 <www.developmentpathways.co.uk/blog/child-benefits-in-the-us-for-children-here-there-and-everywhere>.
- 103 International Labour Office, 'Universal Maternity Protection: Argentina', ILO, Jenewa, 2015.
- 104 International Labour Organization, World Social Protection Report 2017-19 Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals [Executive summary], hlm.17, ILO, 29 November 2017.
- 105 International Labour Organization and United Nations Children's Fund, 'Towards Universal Social Protection for Children: Achieving SDG 1.3' UNICEF, Februari 2019.
- 106 United Nations Children's Fund, 'Ingresos Monetarios para la Niñez', UNICEF, 2020 <www.unicef.org/argentina/media/8826/file/Ingresos%20monetarios%20para%20la%20ni%C3%B1ez.pdf>.
- 107 'Covid-19 Global Gender Response Tracker'.
- 108 Skema perlindungan kesehatan termasuk jaminan kesehatan, layanan kesehatan nasional dan mekanisme berbasis hak lainnya untuk memastikan akses yang efektif ke perawatan kesehatan dan memberikan perlindungan keuangan.
- 109 International Labour Organization, 'Towards Universal Health Coverage: Social Health Protection Principles', Social Protection Spotlight, ILO, Jenewa, Januari 2020 <www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=56009>.
- 110 'Results of Survey on Childcare Constraints among Women Informal Traders in Accra, Durban and Nakuru'.
- 111 Were, Lawrence, P., 'Informality and Health: Universal Health Coverage in the Era of SDGs', The Lancet Global Health, vol. 6 no. 1e22-ee3, Januari 2018.
- 112 National Health Insurance Service, '2018 Medical Aid Statistics', NHIS, Seoul, 2019.

- 113 Lee, Hyejin dkk., 'Power of Universal Health Coverage in the Era of COVID-19: A Nationwide Observational Study', *The Lancet Regional Health, Western Pacific*, vol. 7, no. 100088, Februari 1, 2021 <[www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065\(20\)30088-2/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(20)30088-2/fulltext)>.
- 114 Silverman, Rachel dkk., 'Health Access for All: Thailand's Universal Coverage Scheme', in *Millions Saved: New Cases of Proven Success in Global Health*, edited by Amanda Glassman and Miriam Temin, 3rd ed., Center for Global Development, Washington, 2016. hlm. 89–96.
- 115 Limwattananon, Supon dkk., 'Universal Coverage with Supply-Side Reform: the Impact on Medical Expenditure Risk and Utilization in Thailand', *Journal of Public Economics*, vol. 121, Januari 2015, hlm.79–94 <<https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.11.012>>.
- 116 International Labour Organization, 'Social Protection Responses to the COVID 19 Pandemic in Developing Countries: Strengthening Resilience by Building Universal Social Protection', ILO, Jenewa, Mei 2020.
- 117 International Labour Organization and Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'Extending Childcare Services to Workers in the Informal Economy: Policy Lessons from Country Experiences', Policy Brief no. 3. ILO, Jenewa, 2020 <www.ilo.org/global/WCMS_737555/lang-en/index.htm>.
- 118 Ibid.
- 119 Studi kasus ini diambil dari Ogando, Ana Carolina dan Marina Brito, 'Latin America Scoping Policy Exercise: Considerations on Child Care Services in Brazil and Peru.' *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing*, Belo Horizonte, 2016.
- 120 Karena tingkat pergantian anggota koperasi pemulung yang tinggi, nomor keanggotaan dapat berubah.
- 121 International Labour Organization and Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, 'Cooperatives Meeting Informal Economy Workers' Child Care Needs', ILO, Jenewa, 2018 <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_626682.pdf>.
- 122 UNICEF Rwanda, 'Making childcare easier for working parents,' tautan video: <<https://youtu.be/BXFEKkVay0Q>>.
- 123 United Nations Children's Fund, 'Children eating well in cities: a roadmap for action to support nutritious diets and healthy environments for all children', UNICEF, New York, 2020 <<https://www.unicef.org/media/89396/file/Children-eating-well-in-cities.pdf>>.
- 124 Hungry Cities Partnership <<https://hungrycities.net>>.
- 125 Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Food Security and Street Vendors During COVID-19: Interview with WIEGO's Caroline Skinner blog <www.wiego.org/blog/food-security-and-street-vendors-during-covid-19-interview-wiegos-caroline-skinner>.
- 126 Gentilini, Ugo, dkk., 'Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures', World Bank Washington, DC. September, 2020.
- 127 Devenish, Annie, and Cyrus Afshar, 'Multi-Dimensional Approach to Protect Informal Workers' in Social Protection Responses to Covid-19, no. 4, *Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing*, Manchester, 2020 <www.wiego.org/social-protection-responses-covid-19>.
- 128 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 'Local food Systems and COVID-19; A Glimpse on India's Responses', FAO, 2021 <www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/detail/en/c/1272232/>.
- 129 Cash Assistance for Struggling Families in Tajikistan Amid the Coronavirus and Tajikistan: Protecting Children's Health During COVID-19 <<https://www.unicef.org/tajikistan/stories/cash-assistance-struggling-families-tajikistan-amid-coronavirus>>.
- 130 United Nations Economic and Social Council, 'Social Protection Systems, Access to Public Services and Sustainable Infrastructure for Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls', Commission on the Status of Women, Sixty-third session, 11–22 Maret 2019 <<https://undocs.org/en/E/CN.6/2019/L.3>>.
- 131 Social Protection Inter-agency Cooperation Board, 'Social Protection to Promote Gender Equality and Women's and Girls' Empowerment', pernyataan bersama pada sesi ke-63 Komisi Status Perempuan, Maret 2019 <https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/SPIAC-B%20JS%20CSW%20March%202019.pdf>.
- 132 International Trade Union Confederation, 'Investments in Social Protection and Their Impacts on Economic Growth', ITUC, April 2021 <<https://www.ituc-csi.org/investments-in-social-protection>>.
- 133 UN Women, 'Progress of the World's Women 2015–2016: Transforming Economies, Realizing Rights', UN Women, New York, 2015.
- 134 De Henau, Jérôme dkk., 'Investing in Free Universal Childcare in South Africa, Turkey and Uruguay', Discussion Paper Series No. 28, UN Women, New York, 2019.





untuk setiap anak